



2019

KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN DI DAERAH 3T

Terluar, Terdepan, dan Tertinggal

KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI DAERAH 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal)



PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2019

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Daerah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Tim Penyusun

Yaya Jakaria, Imelda Widjaja, Ika Hijriani, Panca Waluyo, Khairur Raziqin, Dadan

Penyunting Isi

Panca Waluyo, Irsyad Zamjani

Penyunting Bahasa

Imelda Widjaja

Desain sampul dan isi

Genardi Atmadiredja, Bonifatius G.K

vi + 133 hlm; 14,8 cm x 21 cm

ISBN : 976-602-0792-57-6

Penerbit :

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. +6221-5736365

Faks. +6221-5741664

Website: <http://puslitjakdibud.kemdikbud.go.id>

Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, Juli 2019

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdibud/Copyright@2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah selesainya laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus menyambut baik atas terselesaikannya penulisan laporan penelitian tentang “Kajian Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Daerah 3T”. Penelitian ini sangat berguna dalam rangka mengevaluasi program nawacita Jokowi yaitu pemerataan pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan seyogyanya dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa Indonesia dari sabang sampai Merauke tanpa pengecualian. Tetapi pada kenyataannya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut belum merata ke seluruh daerah di Indonesia khususnya daerah 3T. Laporan ini mencoba memetakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T. Untuk itu, dalam kesempatan ini, selaku Kepala Puslitjakdikbud saya menyampaikan terima kasih kepada tim peneliti atas kerja kerasnya sehingga penelitian dan penulisan laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tiada gading yang tak retak, demikian pula hasil penelitian ini masih memerlukan masukan dari semua pihak karena berbagai kekurangan yang ada. Kiranya penelitian dan penulisan ini dapat

berguna bagi semua pihak. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Pusat,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a small hook.

Muktiono Waspodo

KATA PENGANTAR

Pembangunan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) merupakan salah satu implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015–2019. Salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah 3T tersebut difokuskan pada: upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar; yakni pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.

Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kondisi akses pendidikan di Indonesia masih belum merata ke seluruh tanah air, terutama di daerah 3T. Masih terdapat disparitas dalam pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Salah satu upaya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar di daerah 3T tersebut, adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Namun demikian untuk memenuhi hal tersebut, perlu diketahui sampai sejauh mana ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana di daerah 3T. Kajian ini berupaya memetakan kondisi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerah 3T serta menyusun rekomendasi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T tersebut.

Kami berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pembuat kebijakan yang sedang berupaya membangun pendidikan terutama di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, khususnya di daerah 3T.

Selamat Membaca.

Jakarta, Desember 2018
Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Kajian	10
D. Ruang Lingkup Kajian.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	11
A. Akses Penelitian.....	11
B. Mutu Pendidikan.....	15
C. Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan	15
D. Sarana dan Prasarana.....	17
E. Daerah 3T.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Sumber Data	23
C. Analisis Data.....	23
BAB IV PEMETAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI DAERAH 3 T	27
A. Akses Pendidikan di Daerah 3T	27
B. Ketersediaan Prasarana Daerah 3T.....	50
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Rekomendasi.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131



Situasi kelas dan kelengkapan sarana salah satu sekolah di wilayah 3T

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan yang merupakan program prioritas Pemerintah saat ini membangun pendidikan dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang dituangkan dalam Nawacita. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut serta melaksanakan nawacita tersebut lewat sejumlah kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Pembangunan pendidikan di daerah 3T tersebut merupakan salah satu implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015–2019. Pembangunan Pendidikan di daerah 3T tersebut merepresentasikan Nawa Cita ke tiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Dengan demikian, program pembangunan pendidikan ini menjadi agenda prioritas yang harus segera ditangani dan dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Sebagai Agenda Prioritas Perlindungan & Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019



Gambar 1.1. Nawacita Pendidikan 2015-2019

Pada tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Penanganan daerah tertinggal pada periode 2015-2019 dilakukan pada 122 Kabupaten. Jumlah tersebut merupakan hasil dari terentaskannya 70 kabupaten dari 183 kabupaten tertinggal pada periode RPJMN 2010-2014 dan adanya 9 kabupaten tertinggal yang berasal dari Daerah Otonom Baru (DOB). Sedangkan pada akhir RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan paling sedikit 80 kabupaten tertinggal.

Dalam upaya pengentasan 122 kabupaten tersebut telah disusun arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah tertinggal yang difokuskan pada: (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan pendidikan; (b)

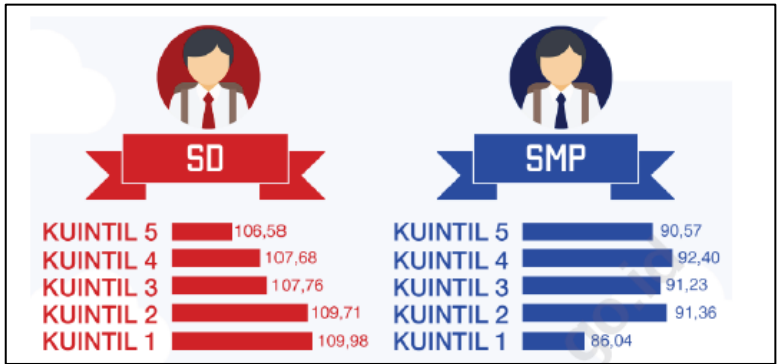
upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar; dan (c) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis.



Gambar 2.2. Agenda Prioritas Pemerintah, 2015-

Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kondisi akses pendidikan di Indonesia masih belum merata ke seluruh tanah air. Hasil olah Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas dalam pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Semakin tinggi status ekonomi rumah tangga, maka semakin tinggi Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dihasilkan dan pola tersebut semakin terlihat jelas seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Status ekonomi rumah tangga yang rendah cenderung ditemukan di daerah 3T. Dari hasil Susenas tersebut, status ekonomi rumah tangga dibedakan dalam lima

kuintil, yaitu Kuintil 1 dan Kuintil 2 adalah rumah tangga dengan status ekonomi rendah, Kuintil 3 dan Kuintil 4 adalah rumah tangga dengan status ekonomi menengah, dan Kuintil 5 adalah rumah tangga dengan status ekonomi tinggi.



Gambar 3.3. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar Berdasarkan Kuintil

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Catatan: Status ekonomi rumah tangga diukur menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga, dengan asumsi bahwa pengeluaran rumah tangga sama dengan pendapatannya.

Dari grafik diatas, terdapat semacam anomali angka APK SD/Sederajat yang justru menunjukkan tren semakin rendah tingkat ekonomi maka semakin besar angka APK SD/Sederajat, yakni 106,58 persen untuk status ekonomi tinggi (Kuintil 5) dan 109,98 persen pada status ekonomi rendah (Kuintil 1). Anomali tersebut dapat dijelaskan dengan kembali pada definisi APK itu sendiri yakni proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk umur sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut yang artinya dapat mencakup anak di luar batas umur sekolah pada

jenjang pendidikan tersebut. Artinya, dapat dimungkinkan bahwa pada Kuintil 1 terdapat orang tua yang menyekolahkan anaknya meski umurnya belum mencapai umur sekolah dengan jenjang pendidikan yang bersesuaian, siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Di sisi lain, pada Kuintil 5 telah banyak orang tua yang notabene memiliki status ekonomi tinggi memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya sesuai jenjang umur yang bersesuaian. Misalnya, orang tua yang tidak buru-buru memasukkan anaknya yang masih berumur 6 tahun ke SD dan menyekolahkan anaknya pada PAUD.

Namun, pada tingkat pendidikan SMP terdapat disparitas nilai APK antar status ekonomi rumah tangga. Partisipasi sekolah lebih besar di rumah tangga dengan status ekonomi tinggi (Kuintil 5) dibandingkan rumah tangga dengan status ekonomi rendah (Kuintil 1), walaupun perbedaan yang dihasilkan hanya pada angka 4,53 persen, namun hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi para pemangku kebijakan untuk menekan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Salah satu upaya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar; serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik. Dalam UU No. 23 Tahun 2003 tersebut dijelaskan bahwa secara nasional, tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar Pemerataan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas peserta didik melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara.

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Depdiknas, 2007).

Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Ditinjau dari fungsi atau peranannya, sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga macam yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran (Sulistiyowati & Rohayati, 2006). Sementara prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar, seperti bangunan dan *furniture* sekolah. Mutu pendidikan nasional tidak dapat terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang layak, memadai, dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri serta peserta didik (murid) yang berkualitas.

Sebagai prasarana sekolah, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan. Kondisi ruang kelas yang baik mendukung proses pembelajaran yang kondusif. Namun sayangnya, sebagian besar ruang kelas dalam kondisi rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat/total. Pada jenjang pendidikan dasar, persentase ruang kelas yang rusak lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan menengah. Meskipun demikian, dibandingkan Tahun Ajaran 2015/2016 kondisi ruang kelas jenjang pendidikan dasar membaik. Hal ini terlihat dari bertambahnya persentase ruang kelas dalam kondisi baik.

Tabel 1.1. Kondisi Ruang Kelas Tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017

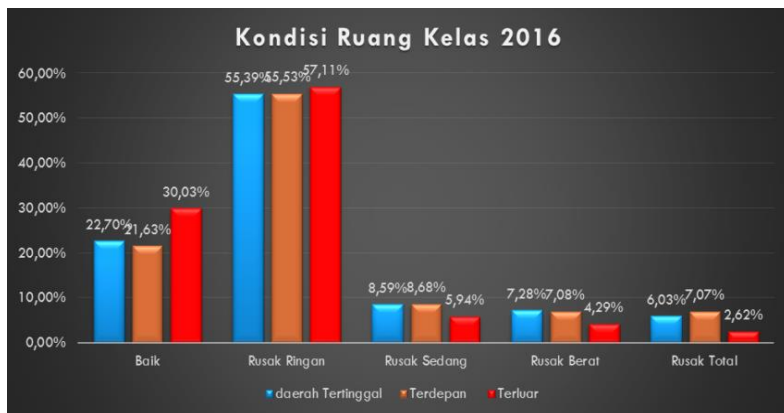
Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas TA 2015/2016			Kondisi Ruang Kelas TA 2016/2017		
	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total
SD	23,85	65,21	10,94	25,74	63,95	10,31
SMP	26,97	64,65	8,39	28,73	62,57	8,71
SMA	47,35	47,98	4,67	45,67	50,00	4,34
SMK	45,68	50,44	3,87	45,66	50,77	3,57

Sumber: PDSPK, Kemendikbud.

Jika dilihat dari tabel tersebut, persentase ruang kelas dengan kondisi baik di SD dan SMP pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing naik sekitar 2 persen. Namun untuk tahun 2017, apakah kondisi tersebut masih sama dengan tahun 2015 dan 2017? Ini yang harus diketahui, terutama di wilayah 3T.

Jika dilihat per daerah pada tahun 2016, kondisi ruang kelas rusak ringan terjadi di seluruh daerah 3T, selebihnya adalah rusak berat dan rusak total. Walau demikian, semakin lama kondisi ruang kelas yang baik akan menjadi rusak ringan, dan rusak ringan akan

menjadi rusak berat dan rusak berat akan menjadi rusak total. Jika tidak ada pemeliharaan dari pihak sekolah, pemerintah daerah dan pusat secara periodik, akan berdampak pada mutu pendidikan di daerah tersebut.



Grafik 4.1. Kondisi Ruang Kelas Daerah 3T, Tahun 2016

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Oleh karena itu, untuk dapat melihat sampai sejauh mana keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah 3T, perlu ditinjau beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tersebut. Kajian ini akan menggambarkan kondisi fasilitas pendidikan di daerah 3T, seperti sebaran jumlah sekolah, kondisi ruang kelas, serta ketersediaan sarana penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan.

B. Permasalahan

Pendidikan di daerah 3T terindikasi sangat minim sekali terutama dalam sarana dan prasarana, seperti halnya sarana prasarana pendidikan di sekolah rusak dan banyak memprihatinkan di

daerah terpencil. Dalam hal ini fasilitas kegiatan belajar mengajar itu sungguh jauh dari tidak layak nya pembelajaran, seperti halnya fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor, bangku sekolah rusak maupun tidak mencukupi.

Ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka akan berakibat pada masalah minimnya pendidikan, disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini. Padahal apabila kita lihat dari pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dan disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya jika pendidikan disusun dengan secara sistematis dan perencanaan yang baik tentunya sesuai dengan tujuan ingin dicapai. Akan tetapi, dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdapat kekurangan dalam manajemen, yaitu kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran.

Realitanya di daerah terpencil sarana prasarana pendidikan tidak memadai, termasuk SDM-nya sendiri sehingga memicu perkembangan pendidikan, dalam hal ini banyak permasalahan timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana seperti halnya fasilitas yang minim yaitu dalam permasalahan utama di setiap pendidikan sekolah di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Ini akan menimbulkan kurangnya kesenjangan mutu pendidikan tersebut. Dampaknya banyak peserta didik yang berada di daerah terpencil tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas tersebut seperti peserta didik di kota.

C. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Memetakan kondisi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerah 3T.
2. Menyusun rekomendasi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T

D. Ruang Lingkup Kajian

Keberhasilan pembangunan pendidikan di daerah 3T ini akan difokuskan pada pemenuhan sarpras di daerah 3T. Sedangkan sasaran jenjang pendidikan dalam analisis adalah jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang hanya bernaung dibawah Kemendikbud dan berstatus negeri.

Daerah yang menjadi fokus kajian adalah daerah 3T. Daerah 3T yang dimaksud berdasarkan surat Nomor: 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) meliputi 26 provinsi dan 142 kabupaten/kota.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Akses Penelitian

Pemenuhan hak atas pendidikan pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari negara untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (UUD 1945). Mengenai tanggung jawab negara terhadap akses pendidikan bagi setiap warga negara, kembali ditegaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nasional adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah

utama. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang (*planning*). Dalam membicarakan perencanaan (*planning*) pembangunan, maka setidaknya-tidaknya ada dua pendekatan yang harus dipergunakan sebagai metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan secara administrasi negara (*public administration*)
2. Pendekatan secara manajerial (*management approach*)

Pendekatan dengan cara manapun dipergunakan, baik secara administrasi negara maupun secara manajerial, kedua-duanya pasti terkait dengan tiga macam aspek, yaitu:

1. aspek filsafat
2. aspek hukum
3. aspek politik

Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa".

Di Indonesia, UUD 1945 merupakan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (konstitusi) telah menjamin hak-hak dasar dari anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung. Seperti halnya Pasal 34, Pasal 38, akan tetapi jaminan negara terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung tersebut kadang

hanya sebatas retorika belaka. Pada realitasnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar dan masih banyak berbagai macam persoalan lainnya yang menyangkut anak yang belum mendapat perhatian penuh dari Pemerintah, khususnya permasalahan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak (masyarakat).

Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis.

Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu padanan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian penyediaan sarana dan prasarana tersebut mencapai seluruh pelosok nusantara atau daerah-daerah terpencil. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, demikian juga tidak terdapat perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa.

Secara nasional, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Di antaranya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membebaskan biaya bagi sekolah dasar (SD), membuat program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Pada sisi lain, harus diakui upaya-upaya pemerintah tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka putus sekolah yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dari SMP menuju tingkat SMA, dan tidak menutup kemungkinan pula terjadi angka putus sekolah dari tingkat SD menuju tingkat SMP. Padahal pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun (WAJAR 12 Tahun) yang sebelumnya adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Faktor yang paling dominan terjadinya anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai subjeknya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karenanya, pendidikan dipandang sebagai bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pandangan ini dikuatkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan mempunyai peranan dalam pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi khususnya. Demikian sebaliknya, ekonomi menganggap bahwa manusia merupakan salah satu produksi.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pendidikan anak di Indonesia senantiasa dilakukan dengan mengutamakan pendidikan sebagai program kerja utama

pemerintah di samping program-program lainnya. Mengingat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tujuan dari bangsa Indonesia adalah: "...mencerdaskan kehidupan bangsa".

Dewasa ini pendidikan nasional telah merupakan subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis. Hal ini berarti pendidikan telah dimasukkan di dalam kancah perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Pendidikan bukan lagi bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, tetapi untuk membangun kekuatan dari politik praktis tertentu untuk kepentingan golongan atau pun kelompoknya sendiri. Di dalam pandangan ini politik ditentukan oleh dua paradigma, yaitu paradigma teknologi dan paradigma ekonomi.

B. Mutu Pendidikan

Menurut Achmad (1993), Mutu Pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Engkoswara (1986) melihat mutu atau keberhasilan pendidikan dari tiga sisi; yaitu: prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungan dengan mutu sekolah, Slamet (1998) berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah.

C. Faktor Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, yaitu:

1. Rendahnya sarana fisik

Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2. Rendahnya kualitas guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20 Tahun 2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas,

tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

D. Sarana dan Prasarana

Secara umum, sarana pendidikan didefinisikan sebagai segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Sementara prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sementara sarana pendidikan adalah segala macam alat yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, sementara prasarana pendidikan tidak digunakan dalam proses atau kegiatan belajar-mengajar.

Terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan itu, dalam daftar istilah pendidikan dikenal pula sebutan alat bantu pendidikan (*teaching aids*), yaitu segala macam peralatan yang dipakai guru untuk membantunya memudahkan melakukan kegiatan mengajar. Alat bantu pendidikan ini yang pas untuk disebut sebagai sarana pendidikan. Jadi, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran. Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk “memudahkan penyampaian/mempelajari materi pelajaran,” prasarana pendidikan untuk “memudahkan penyelenggaraan pendidikan.” Dalam makna inilah sebutan “digunakan langsung”

dan “digunakan tidak langsung” dalam proses pendidikan seperti telah disinggung di muka dimaksudkan. Jelasnya, disebut “langsung” itu terkait dengan penyampaian materi (mengajarkan materi pelajaran), atau mempelajari pelajaran. Papan tulis, misalnya, digunakan langsung ketika guru mengajar (di papan tulis itu guru menuliskan pelajaran). Meja murid tentu tidak digunakan murid untuk menulis pelajaran, melainkan untuk “alas” murid menuliskan pelajaran (yang dituliskan di buku tulis; buku tulis itulah yang digunakan langsung).

Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru (dan murid) untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Dalam Permen PU No. 45 Tahun 2007, berikut mengenai pengertian kerusakan bangunan serta intensitas kerusakan bangunan dalam hal ini bangunan yang dimaksud adalah gedung sekolah dan fasilitasnya.

Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

- a. Kerusakan ringan, adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
- b. Kerusakan sedang, adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dll.

- c. Kerusakan berat, adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung.

Perawatan Bangunan

- a. Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan pada bangunan yaitu:
 - 1. Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;
 - 2. Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang;
 - 3. Perawatan untuk tingkat kerusakan berat.
- b. Besarnya biaya perawatan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya, yang ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama;
 - 2. Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama;
 - 3. Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan

tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

- c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat.

E. Daerah 3T

Daerah 3T adalah daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor termasuk di dalamnya ialah sektor pendidikan. Yang mana menurut Cynthia (2009) dalam tesisnya memaparkan bahwa salah satu permasalahan yang ada di daerah 3T adalah pendidikan, di mana di daerah 3T belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, wilayah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau—salah satunya adalah Daerah 3T.

Menurutnya kondisi tersebut mengakibatkan ketidaksetaraan penerima layanan pendidikan pada usia sekolah nasional. Dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas yang buruk dan kesulitan pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat Daerah 3T adalah akar dari rasa sungkan masyarakat Daerah 3T untuk memanfaatkan fasilitas edukasi yang tersedia.

Kenyataan tersebut sungguh kontradiktif dengan harapan negara yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut. Dengan kata lain, pendidikan yang dimaksud pasal di atas saat ini hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat Indonesia saja. Hal tersebut didasarkan pada distribusi kemajuan yang inefektif.

Mutrofin (2009) menyimpulkan bahwa, secara umum, terdapat butir-butir masalah utama yang menjadi akar permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan. Hal tersebut adalah inefektivitas kinerja tenaga pendidik; distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata; relevansi tujuan dan rencana pendidikan dengan kondisi yang ada, dan; manajemen pendidikan yang inefisien. Selain itu, ide tentang pemerataan pendidikan adalah konsep yang mengarah pada kebutuhan pendidikan secara menyeluruh (Amtu, 2014).



Suasana peserta didik sedang berkegiatan di luar kelas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan *descriptif research* atau bersifat kuantitatif. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian keberhasilan pendidikan di daerah 3T dilihat dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras), serta pendanaan pendidikan yang dilihat dari disparitas APK.

B. Sumber Data

Data yang dianalisis bersumber dari data DAPODIK dan data-data lain yang tersedia di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kemendikbud.

C. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif untuk menggambarkan keadaan pendidikan dan analisis rasio untuk mengetahui ketersediaan dan keberhasilan sarana dan prasarana dalam mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di wilayah 3T. Standar untuk menilai kecukupan sarana dan prasarana adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Analisa rasio merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam pos data dengan pos data lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan.

Analisis lain yang digunakan adalah menghitung persentase keadaan sarpras berdasar masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan Mendikbud No 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Kajian ini tidak berusaha membuktikan hubungan antar variabel penelitian. Data yang tidak tersedia atau belum lengkap serta untuk mengkonfirmasi kebenaran data dari sumber data sekunder selanjutnya digali melalui observasi dan diskusi melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang kemudian dalam penelitian ini disebut sebagai data primer. Penggunaan data sekunder seperti data Dapodik yang bersumber dari Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud dan data-data Badan Pusat Statistik (BPS), laporan hasil penelitian yang relevan dan dokumen lain dari dinas pendidikan serta dokumen-dokumen lain yang bersumber dari internet.

Dengan demikian, kajian ini akan menganalisis rasio-rasio yang menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan yang terkait dengan ketersediaan layanan pendidikan sebagai berikut:

1. Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek)
2. Rasio siswa per kelas (R-S/K)
3. Rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK)
4. Persentase perpustakaan (% Perpus)
5. Persentase laboratorium (%Lab)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk akses yang meluas disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. R-S/Sek dijadikan ukuran untuk melihat besar kecilnya sekolah yang ditetapkan dari pembakuan tipe sekolah. R-S/K digunakan untuk melihat padatnya suatu kelas berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dalam Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Setiap kelas seharusnya dalam perencanaan pembangunan sekolah diisi oleh 32 siswa untuk jenjang SD dan 36 untuk jenjang SMP. R-K/RK digunakan untuk melihat pemakaian atau pemanfaatan ruang kelas apakah sudah sesuai dengan tujuan bahwa setiap ruang kelas hanya digunakan sekali kegiatan belajar mengajar.

Persentase Perpustakaan dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan perpustakaan di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki perpustakaan. Persentase UKS dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan ruang usaha kesehatan di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki ruang UKS. Persentase Lab dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan laboratorium di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki laboratorium, terlebih SMA harusnya memiliki 6 jenis laboratorium dan SMK memiliki 3 jenis laboratorium.

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah akses pendidikan di daerah 3T telah meluas maka ketujuh indikator tersebut dilakukan konversi untuk menghasilkan satuan yang sama menjadi nilai akses. Nilai akses yang meluas adalah penjumlahan nilai ketujuh indikator akses yang meluas dibagi tujuh dengan asumsi bahwa setiap indikator akses yang meluas memiliki peranan yang sama.

Dari indikator-indikator tersebut, akan dianalisis untuk memenuhi:

1. Kecukupan ruang kelas dengan mengukur berapa besar rata-rata rasio siswa terhadap rombongan belajar. Ini akan menunjukkan apakah kapasitas ruang kelas masih bisa dioptimalkan atau sudah jenuh.

2. Rasio rombel terhadap ruang kelas, jika lebih dari satu menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan kelas rangkap (*double shift*).
3. Melakukan analisis silang antara langkah satu dengan langkah dua, hasil analisis silang akan menunjukkan apakah benar-benar kekurangan ruang kelas ataupun penggunaan ruang kelas yang belum optimal.

Analisis digunakan matrik sebagai berikut:

		Rasio Rombel terhadap ruang Kelas		
Rasio Siswa terhadap Rombel		< 1	= 1	> 1
	<30	Ruang Kelas Berlebihan	Perlu dioptimalkan	Potensi untuk regrouping
	30 - 40	Perlu dioptimalkan	ideal	RKB masih kurang
	> 40	Pengendalian Jumlah Siswa	RKB masih kurang	RKB sangat Kurang

Selain rasio-rasio indikator keberhasilan tersebut, diperlukan analisis capaian APK untuk daerah 3T. Disparitas APK antar daerah dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengetahui sampai sejauh mana daerah 3T telah memenuhi target pencapaian APK serta mengetahui hambatan dan upaya-upaya daerah dalam memenuhi target pencapaian APK. Diperlukan pula analisis sejumlah persentase kondisi ruang kelas yang baik, rusak berat, dan rusak ringan di masing-masing daerah 3T, yang diperlukan sebagai dasar intervensi dalam hal penganggaran perbaikan ruang kelas sebagai indikator pencapaian mutu pendidikan daerah 3T.

BAB IV

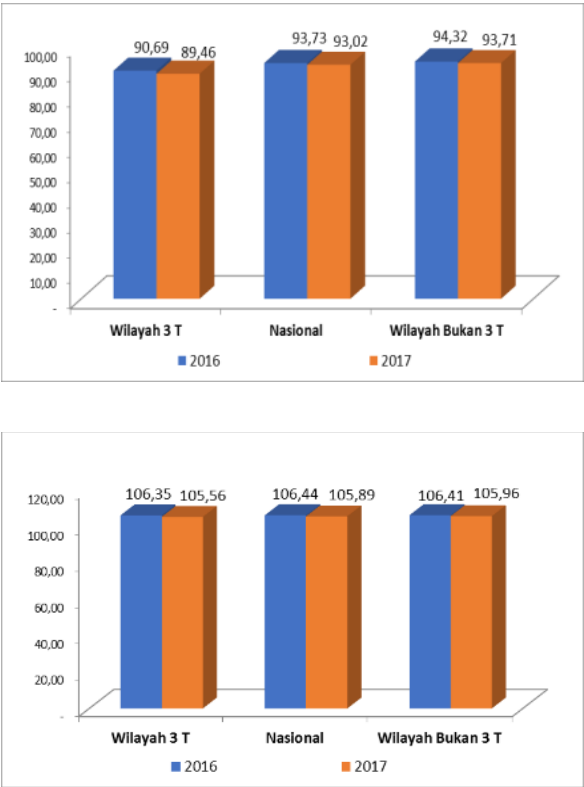
PEMETAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI DAERAH 3 T

A. Akses Pendidikan di Daerah 3T

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam wilayah 3T digunakan beberapa indikator, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Secara rata-rata nasional, APK –APM untuk jenjang SD/MI sederajat (termasuk Kemenag) mengalami penurunan, namun penurunannya tidak secara signifikan. Penurunan tersebut tidak berarti menunjukkan kinerja pendidikan menjadi rendah, akan tetapi penurunan tersebut dipengaruhi oleh lebih banyaknya SD dihuni oleh anak usia 7-12 tahun, sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mempersyaratkan usia

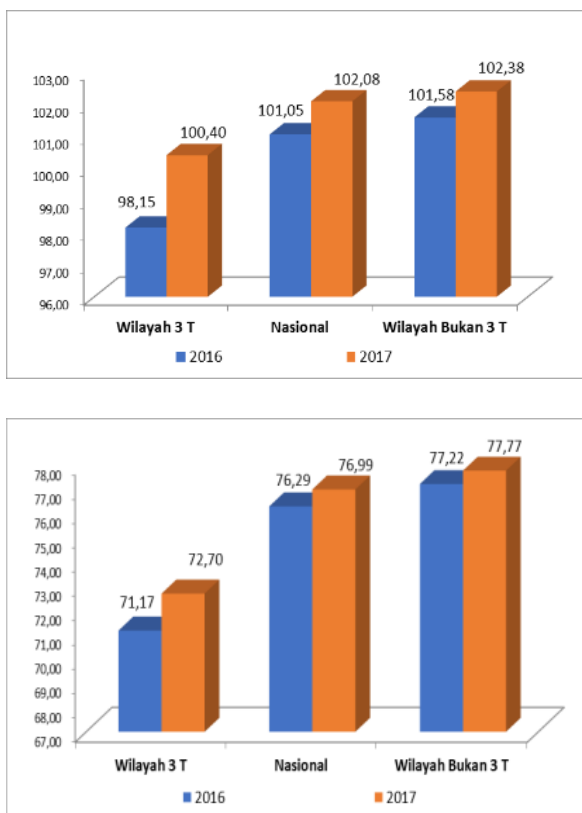
masuk anak SD adalah 7 tahun. Sebelum terbitnya Permendikbud tersebut, usia 6 tahun sudah bisa masuk SD.



Grafik 4.1. Pencapaian Akses APK-APM Pendidikan Dasar (SD) Daerah 3T, Nasional, dan Bukan 3T

Dengan demikian, terbitnya Permendikbud tersebut menyebabkan turunnya APK dan APM SD tersebut. Grafik tersebut menunjukkan perbandingan APK dan APM SD baik di daerah 3T, Nasional dan daerah Bukan 3T.

Berbeda dengan APK dan APM tingkat pendidikan SMP, secara nasional APK dan APM tingkat pendidikan SMP mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan terdapat kenaikan jumlah peserta didik pada jenis SMP sederajat (SMP/MTs/Paket B/SLB(SMP)/Salafiah Wustha) pada tahun 2017 jika dibanding dengan jumlah tahun 2016.



Grafik 4.2. Pencapaian Akses APK-APM Pendidikan Dasar (SMP) Daerah 3T, Nasional, dan Non 3T

Sesungguhnya, APK untuk tingkat SD sudah tinggi dan bahkan APM sudah melewati *Universal Primary Education* yang dipatok pada angka 100% pada tahun 2015. Meskipun demikian untuk tingkat SMP, APK dan APM masih relatif rendah terutama terjadi pada kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Rendahnya capaian APK dan APM SD dibanding dengan SMP untuk daerah 3T tersebut lebih banyak ditemui pada daerah Tertinggal dibanding daerah Terluar dan Terdepan.

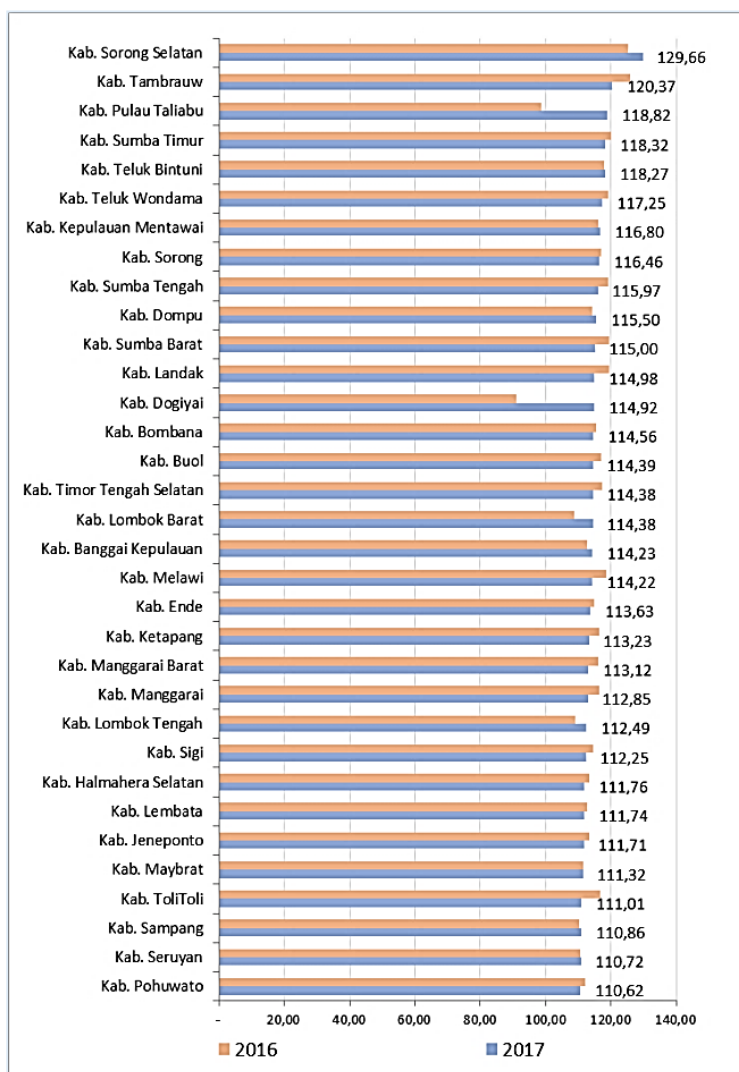
1. Daerah Tertinggal

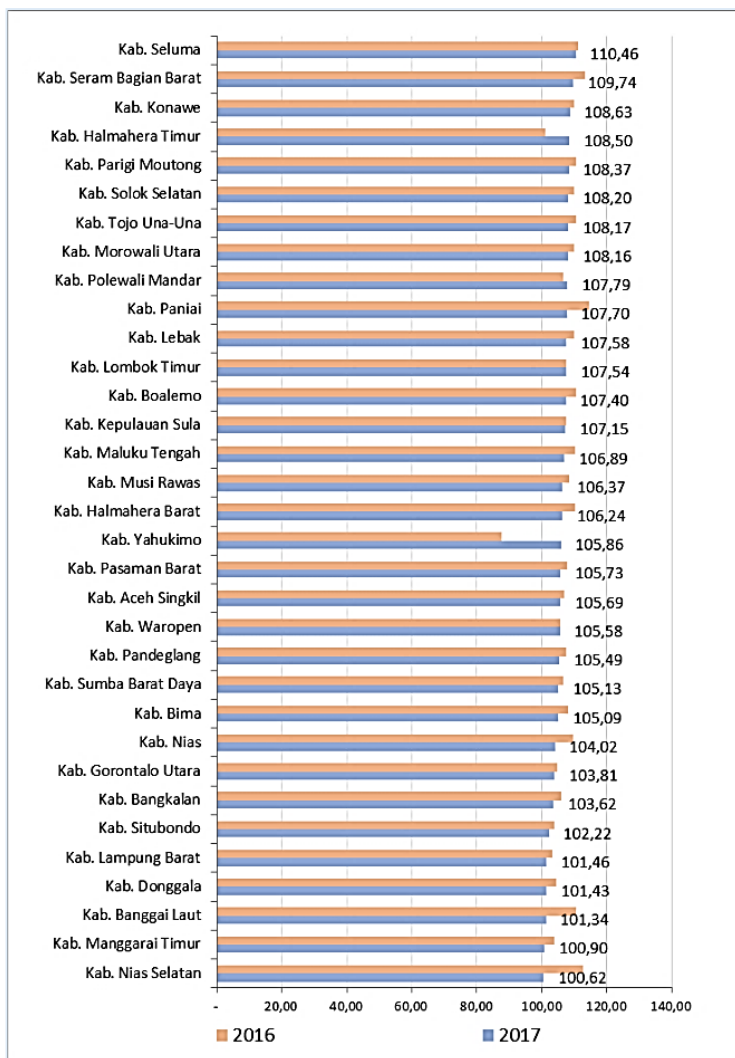
Berdasarkan surat nomor: 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pengertian ini memiliki tiga kata kunci yang perlu diperhatikan. Pertama, daerah kabupaten bukan daerah yang bernomenklatur kota. Kedua, masyarakat dan wilayah, dua aspek ini dirinci ke dalam enam kriteria pokok ketertinggalan yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Ketiga, relatif dalam skala nasional, daerah yang tergolong dalam kumpulan daerah 3T merupakan daerah yang telah didata dan diperbandingkan secara relatif dengan seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

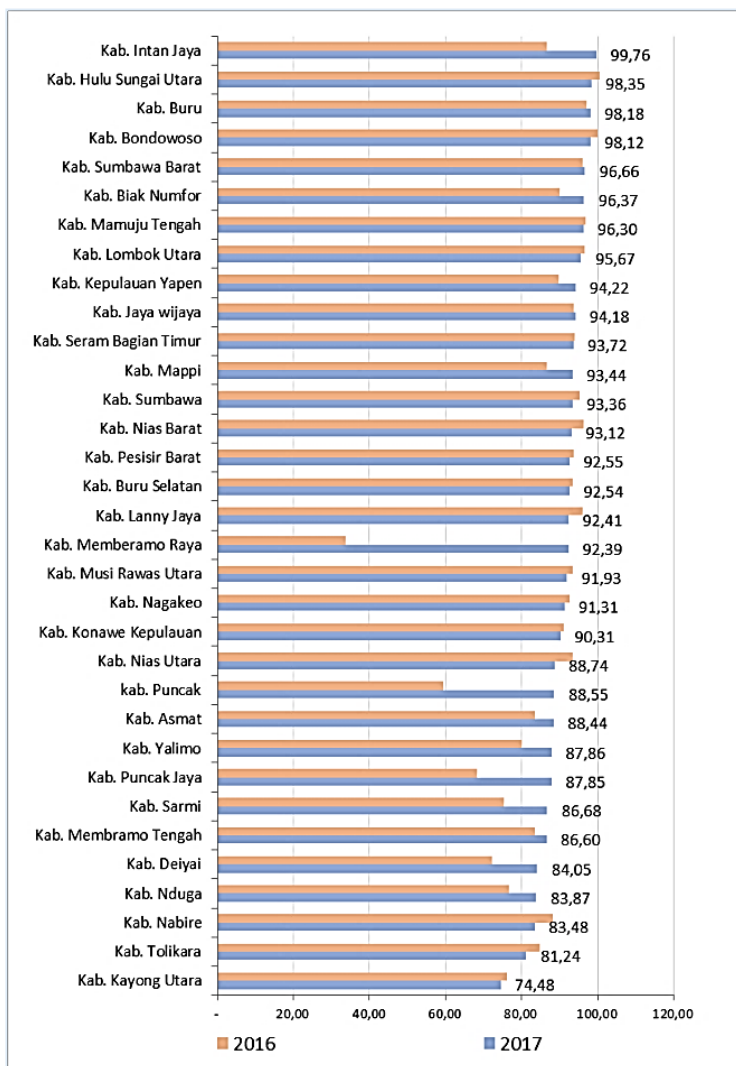
Wilayah Tertinggal terdapat di 22 provinsi dengan 99 kabupaten/kota. Pada daerah tertinggal ini, terdapat 42 kabupaten

dengan APK di bawah rata-rata nasional (105,01). APK tingkat SD terendah ada di Kabupaten Kayong Utara, provinsi Kalimantan Barat serta beberapa kabupaten di wilayah Kepulauan Papua. Secara total Kabupaten Kayong Utara masih dalam masa transisi, sehingga dalam lima tahun sebelumnya kabupaten tersebut belum terlalu fokus pada aksesibilitas mutu pendidikan. Selain itu, rendahnya APK dan APM di kabupaten Kayong Utara ini terjadi di Kepulauan Karimata yang masih sangat rendah dikarenakan sarana prasarana yang belum menunjang dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan APK tertinggi berada di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Tingginya APK di Kab. Sorong Selatan ini salah satunya adalah disebabkan adanya dampak dari program Pemerintah Daerah Sorong Selatan tentang pendidikan yang mewajibkan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Grafik berikut menggambarkan capaian APK dan APM untuk satuan pendidikan SD daerah tertinggal.

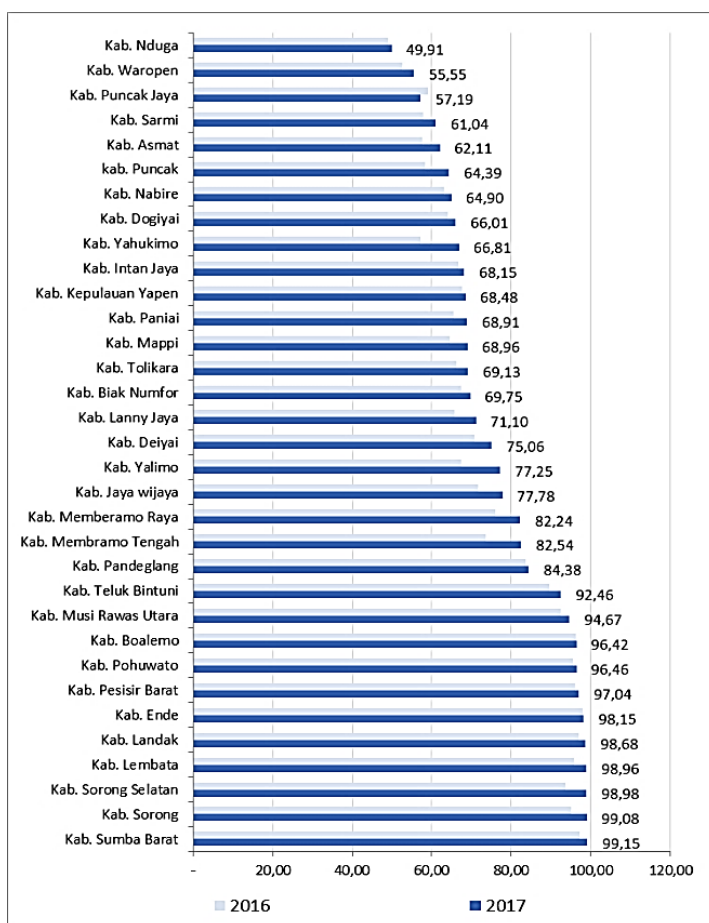


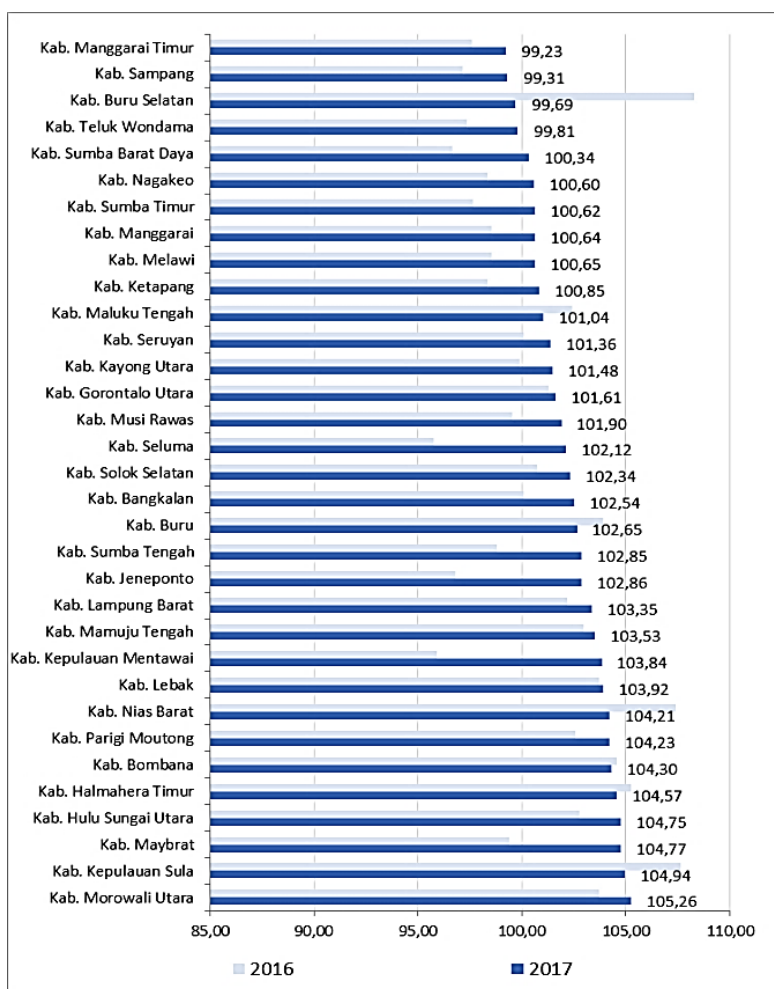


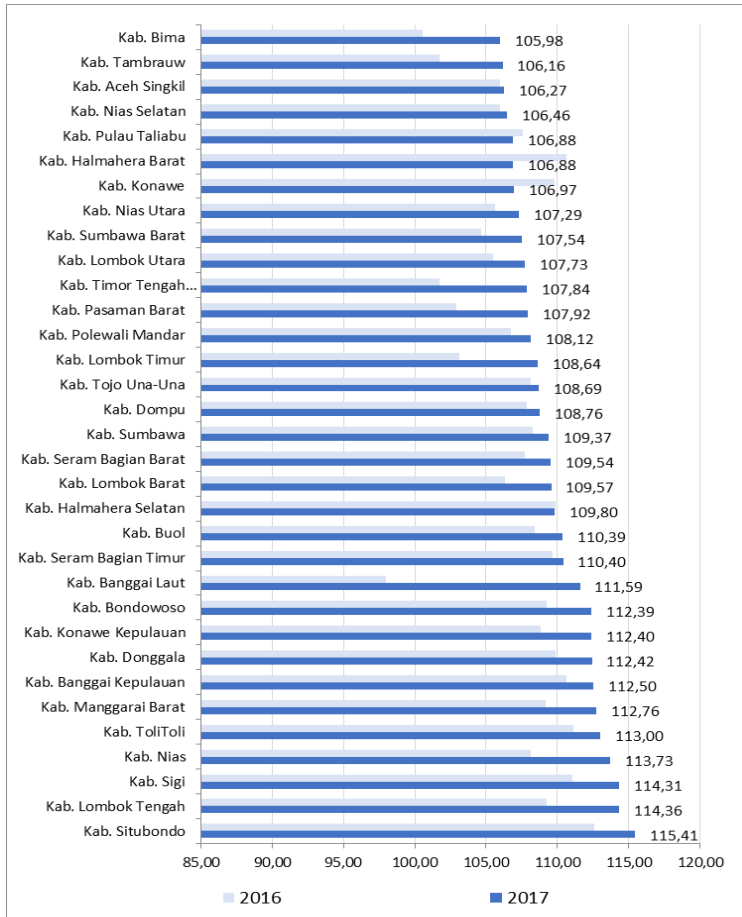


Grafik 4.3. Capaian APK dan APM Untuk Satuan Pendidikan SD Daerah Tertinggal

Sedangkan untuk tingkat SMP, partisipasi anak-anak usia sekolah tingkat SMP di daerah Tertinggal lebih rendah dibandingkan dengan tingkat SD, APK terendah berada di Kab. Nduga yang hanya mencapai 49,91. Faktor keamanan dan sulitnya geografis menyebabkan rendahnya anak-anak usia sekolah tingkat SMP ini bersekolah. Tabel berikut menggambarkan APK tingkat SMP untuk daerah tertinggal pada tahun 2017.







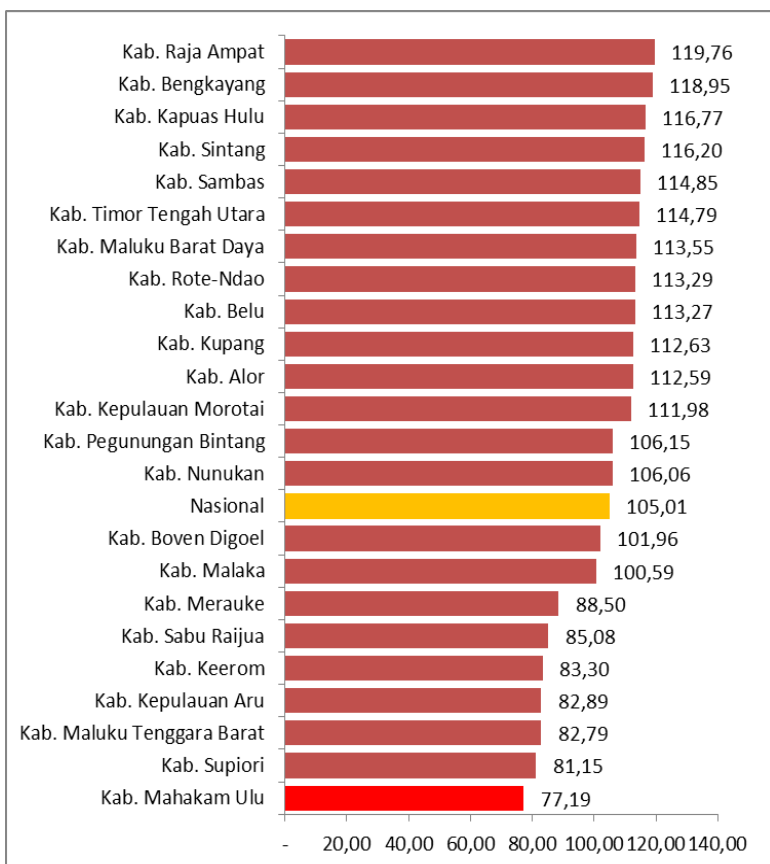
Grafik 4.4. Capaian APK dan APM Untuk Satuan Pendidikan SMP Daerah Tertinggal

Upaya untuk meningkatkan transisi dari SD ke SMP merupakan salah satu hal pokok yang perlu dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar yang masih relatif rendah. Akses terhadap layanan pendidikan dasar, dalam hal

ini ketersediaan infrastruktur sekolah merupakan faktor utama agar orang tua bisa menyekolahkan anaknya. Namun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah tidak secara otomatis menjamin bahwa orang tua akan menyekolahkan anaknya. Selain ketersediaan bangunan sekolah, masih ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan orang tua mengambil keputusan untuk menyekolahkan anaknya. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah biaya langsung dan tidak langsung untuk bersekolah, faktor budaya, jarak geografis ke sekolah, dan persepsi tentang manfaat bersekolah. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

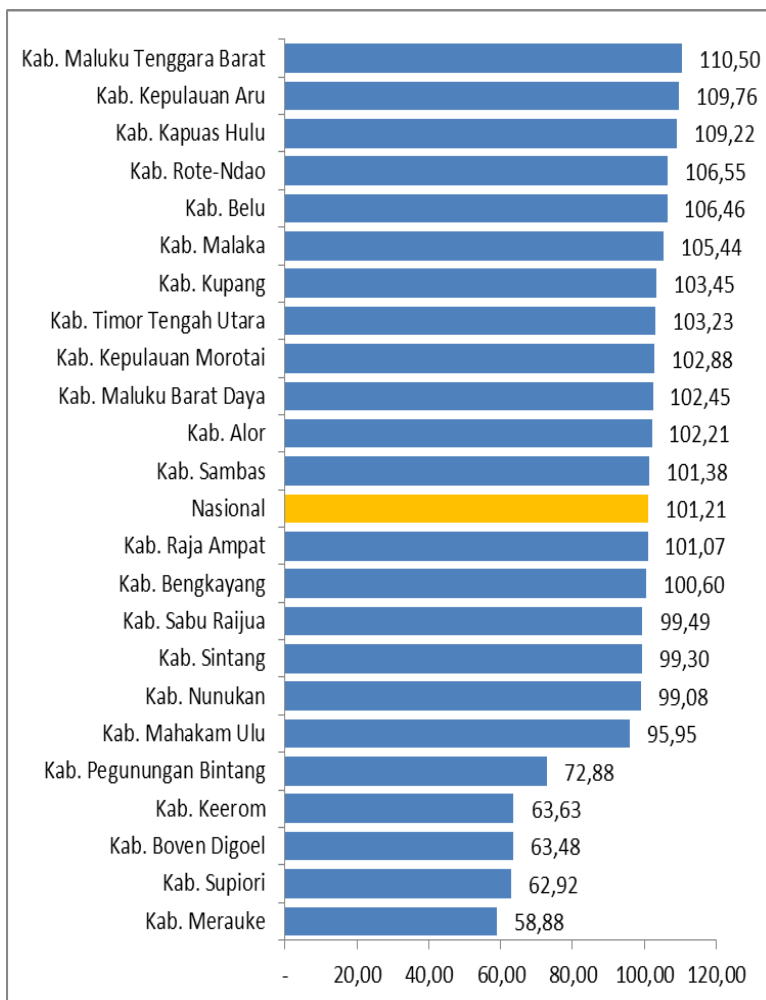
2. Daerah Terdepan

Daerah terdepan merupakan suatu daerah yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain serta tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Daerah terdepan dan terluar ini sangat sensitif dan dapat terancam keberadaannya apabila kurang penanganan dan perhatian dari pemerintah. Seperti halnya kasus Sipadan dan Ligitan, yang pada akhirnya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau terdepan/terluar ini merupakan beranda depan negara dan keberadaannya sangat berpengaruh pada kedaulatan NKRI, sehingga pulau-pulau tersebut sangat perlu untuk dikembangkan dan dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai strategis dan potensinya.



Grafik 4.5. APK SD Daerah Terdepan, Tahun 2017

Jika dilihat dari Akses Pendidikan untuk daerah terdepan, APK daerah terdepan sedikit lebih baik dibandingkan dengan APK daerah tertinggal. Untuk tingkat SD, terdapat 9 daerah dengan APK dibawah rata-rata nasional. APK SD terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (77,93) dan tertinggi ada pada Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat (119,76).



Grafik 4.6. APK SMP Daerah Terdepan, Tahun 2017

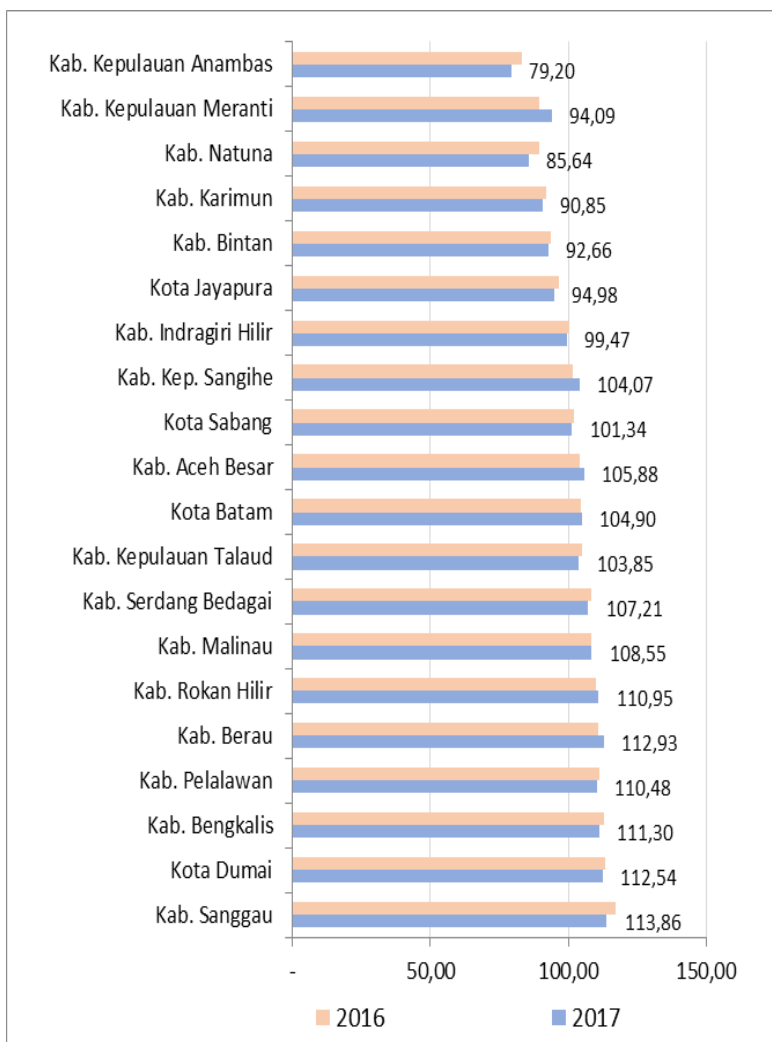
Sedangkan APK untuk SMP, tertinggi berada di Kab. Maluku Tenggara Barat (110,50%) dan terendah berada di Kab. Merauke (58,88%). Jika dilihat dari grafik ini, beberapa kabupaten yang perlu

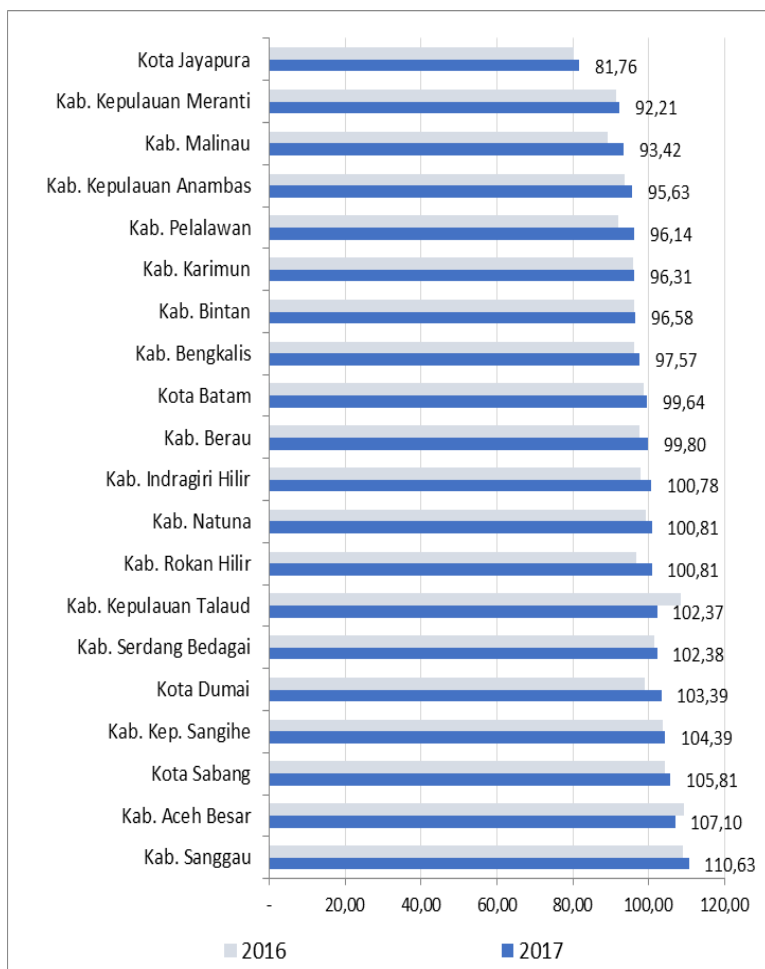
diprioritaskan untuk mendapatkan intervensi paling besar adalah daerah yang didominasi oleh kabupaten di wilayah Papua (Kab. Kerom, Boven Digoel, Sipiuri dan Merauke).

3. Daerah Terluar

Daerah Terluar merupakan suatu daerah bagian paling luar Indonesia yang umumnya berada di pulau-pulau terluar dan daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain serta memiliki letak strategis. Daerah terluar ini sangat sensitif dan dapat terancam keberadaannya apabila kurang penanganan dan perhatian dari pemerintah. Daerah dengan pulau Terluar ini merupakan beranda depan negara dan keberadaannya sangat berpengaruh pada kedaulatan NKRI, sehingga daerah terluar dan pulau-pulau tersebut sangat perlu untuk dikembangkan dan dikelola dengan mempertimbangkan nilai-nilai strategis dan potensinya.

Untuk daerah terluar, APK SD terendah berada di Kab. Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau (79,20) dan tertinggi di Kab. Sanggau, Kalimantan Barat (113,86). Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP, APK terendah berada di Kota Jayapura (81,76) dan tertinggi berada di Kab. Sanggau, Kalimantan Barat.





Grafik 4.7. APK SD dan SMP Daerah Terluar, Tahun 2017

Dengan demikian, angka partisipasi di atas, baik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal menunjukkan kondisi yang berbeda untuk masing-masing jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD angka partisipasi sekolah di atas 100 menunjukkan

kecenderungan masyarakat untuk mengikuti pendidikan baik, khususnya bagi kabupaten di mana nilainya melebihi 100. Bagi wilayah yang besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada wilayah di mana terdapat anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak.

Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMP menunjukkan gejala yang sama, masih cukup banyak kabupaten yang belum mencapai nilai 100. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa masih didapat gejala angka putus sekolah, di mana anak usia sekolah setamat dari SD tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMP.

4. Alokasi Anggaran dan Akses Pendidikan

Jika diperhatikan, masih terdapat perbedaan ketimpangan pendidikan antara wilayah kota dengan wilayah kabupaten di daerah 3T, hal ini diindikasikan oleh adanya perbedaan jumlah anggaran bidang pendidikan yang dialokasikan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Hamzah (2017), menunjukkan adanya pengaruh pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pendidikan lebih besar terhadap tingginya APK pada setiap jenjang pendidikan. Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara besarnya anggaran pendidikan dan akses pendidikan di daerah 3T pada tahun 2017.

Tabel 4.1. Keterkaitan antara besarnya anggaran pendidikan dan akses pendidikan di daerah 3T pada tahun 2017

No	Kab/Kota	Provinsi	% Ang Pnddkn	APK		APM	
				SD	SMP	SD	SMP
1	Kab. Situbondo	Jawa Timur	15,7	105,1	110,7	96,3	88,8
2	Kab. Ende	NTT	15,6	110,8	97,8	95,2	65,9
3	Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan	15,3	119,3	99,4	92,4	79,9
4	Kab. Sorong	Papua Barat	14,9	112,9	94,0	73,7	68,3
5	Kab. Lebak	Banten	14,3	110,5	103,4	94,6	80,7
6	Kab. Pasaman Barat	Sumatera Barat	14,0	112,4	102,1	96,4	75,6
7	Kab. Manggarai	NTT	13,4	115,7	98,2	95,2	66,5
8	Kab. Pandeglang	Banten	13,2	108,4	82,7	97,2	65,8
9	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	13,1	118,1	109,7	96,7	75,6
10	Kab. Sumba Tengah	NTT	12,9	108,1	98,6	95,3	64,9
11	Kab. Sampang	Jawa Timur	12,6	105,1	97,1	92,8	62,2
12	Kab. Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	12,4	119,7	106,6	92,9	81,3
13	Kab. Jeneponto	Sulawesi Selatan	12,4	113,9	96,4	97,2	71,3
14	Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	12,3	111,0	99,9	77,3	73,6
15	Kab. Landak	Kalbar	12,2	117,1	96,5	95,8	62,7
16	Kab. Sumbawa Barat	NTB	12,2	114,8	104,6	83,9	80,0
17	Kab. Yahukimo	Papua	8,4	88,3	56,6	51,2	31,2
18	Kab. Lanny Jaya	Papua	8,0	92,1	63,7	65,5	41,5
19	Kab. Waropen	Papua	7,5	90,9	52,3	81,8	34,4
20	Kab. Pesisir Barat	Lampung	7,3	93,3	95,6	74,1	75,5
21	Kab. Puncak Jaya	Papua	7,3	77,5	58,2	44,6	36,0
22	Kab. Sarmi	Papua	7,1	83,6	57,6	57,6	31,4
23	Kab. Hulu Sungai Utara	Kalsel	7,1	98,4	102,6	93,4	79,2
24	Kab. Nduga	Papua	7,1	77,7	47,9	37,6	31,4
25	Kab. Tolikara	Papua	7,1	84,7	66,1	57,4	48,3

No	Kab/Kota	Provinsi	% Ang Pnddkn	APK		APM	
				SD	SMP	SD	SMP
26	Kab. Paniai	Papua	6,7	70,9	65,4	42,2	34,1
27	Kab. Buru Selatan	Maluku	6,5	99,9	107,2	61,2	78,1
28	Kab. Mamberamo Tengah	Papua	6,4	87,6	72,3	22,2	33,4
29	Kab. Yalimo	Papua	5,8	78,1	66,1	42,3	41,9
30	Kab. Intan Jaya	Papua	5,6	75,2	63,7	43,8	10,7
31	Kab. Jayawijaya	Papua	1,0	88,3	70,2	65,5	47,2
32	Kab. Nabire	Papua	0,0	83,5	62,0	58,1	43,8
33	kab. Puncak	Papua	0,0	59,4	57,3	36,3	30,8
34	Kab. Deiyai	Papua	0,0	66,2	69,7	31,7	48,9

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, PASKA, Kemendikbud.

Jika dilihat pada tabel di atas, besarnya anggaran pendidikan (tanpa transfer daerah) yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah secara rata-rata berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan. Pada kategori daerah tertinggal beberapa daerah berupaya terlepas dari kategori tertinggal dengan berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan, misalnya Kab. Situbondo, Ende, Musi Rawas, Sorong, Lebak, Pasaman Barat yang rata-rata alokasi anggaran pendidikan di atas 10% memberikan dampak pada peningkatan APK. Sementara daerah-daerah yang alokasi anggaran untuk pendidikan kecil, berdampak pula pada kecilnya APK daerah tersebut.

Praktik baik yang dilakukan oleh Pemerintah Lebak, menunjukkan komitmen yang baik oleh Pemerintah Daerah dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun yang dilakukan di Dinas Pendidikan Lebak, pemerintah daerah memberikan dukungan yang kuat untuk dapat bangkit dari status daerah tertinggal.

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Akses Pendidikan Prov. Banten, 2017

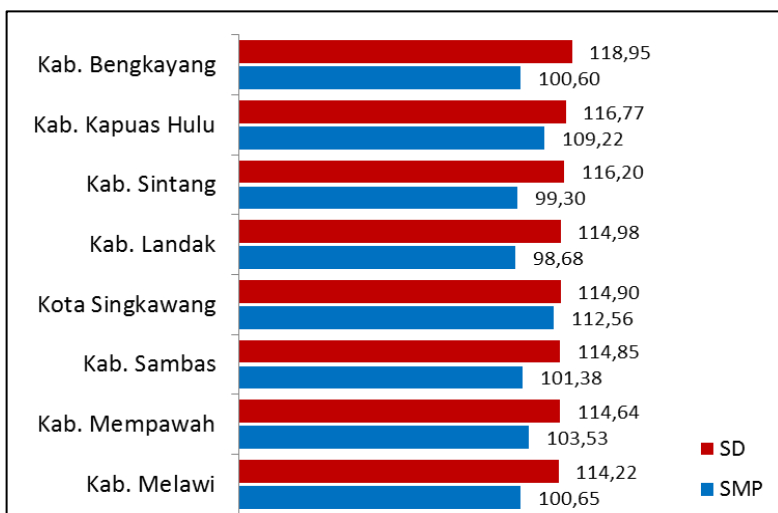
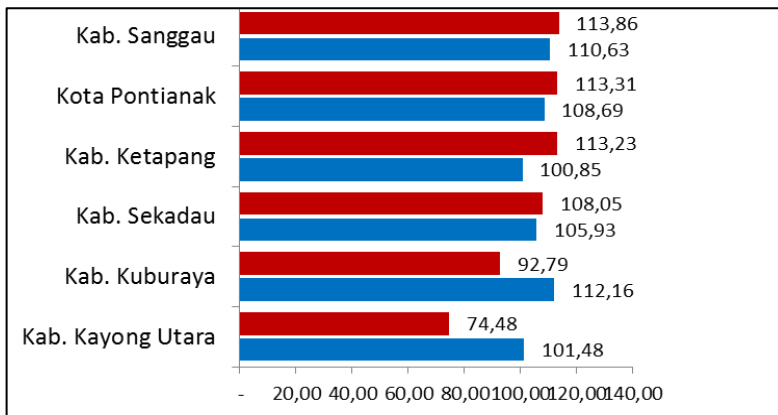
No.	Nama Wilayah	% Alokasi Anggaran Pendidikan (diluar transfer daerah)	APK		APM	
			SD	SMP	SD	SMP
1	Prov. Banten	8.74	107.7	98.9	95.7	80.1
2	Kab. Pandeglang	13.15	108.4	82.7	97.2	65.8
3	Kab. Lebak	14.30	110.5	103.4	94.6	80.7
4	Kab. Tangerang	11.19	109.6	104.6	94.1	84.3
5	Kab. Serang	14.77	106.7	98.8	96.3	77.1
6	Kota Cilegon	11.13	107.0	90.8	95.6	75.1
7	Kota Tangerang	19.09	106.6	102.3	96.4	87.5
8	Kota Serang	14.43	101.3	106.9	99.2	86.8
9	Kota Tangerang Selatan	14.07	105.9	97.5	95.4	83.4

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, PASKA, Kemendikbud, 2017

Begitu juga halnya dengan Kab. Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat, tingginya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk sektor pendidikan berpengaruh pada hasil capaian kinerja pendidikan. Pemerintah Kab. Sanggau telah peduli memberikan alokasi dana pendidikan lebih besar dibanding daerah lain di Kalimantan Barat.

Tabel 4.3. Neraca Pendidikan Kab. Sanggau, 2017

No.	Nama Wilayah	Belanja	Urusan Pendidikan	Transfer Daerah	% Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%)
1	Prov. Kalimantan Barat	5,065.40	933.87	1,442.79	12.94
2	Kab. Sambas	1,578.29	513.22	353.46	13.04
3	Kab. Mempawah	995.92	263.65	179.96	10.26
4	Kab. Sanggau	1,617.38	452.18	246.78	14.99
5	Kab. Sintang	1,828.47	414.56	242.01	10.88
6	Kab. Kapuas Hulu	1,615.88	367.41	227.72	10.06
7	Kab. Ketapang	2,039.88	445.59	245.57	11.15
8	Kab. Bengkayang	1,036.31	242.35	157.81	9.62
9	Kab. Landak	1,284.61	359.08	230.22	12.22
10	Kab. Sekadau	890.64	195.35	123.18	9.40
11	Kab. Melawi	1,266.09	233.17	150.38	7.42
12	Kab. Kayong Utara	782.24	90.14	72.47	2.49
13	Kab. Kubu Raya	1,464.21	411.40	269.69	11.86
14	Kota Pontianak	1,500.45	422.34	230.33	15.12
15	Kota Singkawang	863.38	233.53	120.69	15.19



Grafik 4.8. APK SD dan SMP Prov. Kalbar, 2017

Jika dilihat dari tabel, besarnya presentase anggaran pendidikan (tanpa transfer daerah) yang dialokasikan daerah, berpengaruh pada peningkatan APK. Pada tahun 2017, Pemerintah Kab. Sanggau berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup. Dengan

pembangunan jalan menuju Kab. Sanggau yang telah menjadi lebih baik, memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek baik perekonomian maupun pendidikan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besar kecilnya persentase anggaran pendidikan dalam APBD sangat berkaitan erat dengan komitmen pimpinan daerah dalam pembangunan pendidikan. Konstitusi mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan adalah minimal 20% dari APBN dan APBD (di luar anggaran Pendidikan Kedinasan). Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah 3T ini, pendidikan belum menjadi prioritas utama pembangunan.

B. Ketersediaan Prasarana Daerah 3T

Arah dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia telah terumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 (Renstra Kemendikbud 2015-2019) yang dicerminkan dalam misi pendidikan Indonesia. Dalam Renstra Kemendikbud ditetapkan 5 (lima) dengan kode M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, kode M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, kode M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, kode M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Ketersediaan sarana dan prasarana di daerah 3T sangat terkait dengan misi pendidikan kode M2 yakni mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan. Terdapat lima jenis indikator

yang dianggap paling penting untuk mengetahui akses pendidikan yang meluas. Indikator yang dianggap penting untuk mengetahui ketercapaian misi tersebut adalah rasio Siswa per sekolah (R- S/Sek), rasio siswa per kelas (R-S/K), dan rasio siswa per rombel/ruang kelas (R-K/RK), persentase (%) Perpustakaan dan persentase (%) Laboratorium. Dari hasil data sekunder, dirangkum beberapa capaian indikator untuk daerah 3T pada tingkat pendidikan SD dan SMP, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Data dan Indikator Pendidikan SD dan SMP Daerah 3T, tahun 2017

Data	Tertinggal	Terluar	Terdepan
SD			
Siswa SD	2.984.233	796.619	2.984.233
Sekolah	21.022	4.291	21.022
Rombel	142.808	36.213	142.808
Ruang Kelas	140.451	34.015	140.451
Rasio Siswa / Sekolah	142	186	142
Rasio Siswa / Rombel	21	22	21
Rasio Rombel /Sekolah	6,79	8,44	6,79
Rasio Rombel /Ruang Kelas	1,02	1,06	1,02
SMP			
Siswa SMP	279.895	223.861	1.069.367
Mengulang	942	1.227	5.515
Sekolah	1.286	1.328	6.132
Rombel	9.990	8.653	40.755
Ruang Kelas	10.263	8.739	40.954
Rasio Siswa / Sekolah	218	169	174
Rasio Siswa / Rombel	28	26	26
Rasio Rombel / Sekolah	7,77	6,52	6,65
Rasio Rombel /Ruang Kelas	0,97	0,99	1,00

Sumber: PDSPK, Kemendikbud, 2017.

Dalam Permendikbud No. 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum dinyatakan bahwa jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Selanjutnya, setiap SMP dan MTs tersedia ruang perpustakaan dan laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

1. Rasio Siswa per Sekolah

Gambaran tentang kecukupan ruang kelas menunjukkan kualitas layanan pendidikan tingkat kabupaten di daerah terdepan, namun demikian perlu memperhatikan rasio siswa terhadap sekolah. Rasio siswa per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antar jumlah siswa dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di daerah 3T. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya.

a. Rasio Siswa per Sekolah Daerah Terdepan

Tabel 4.5. Rasio Siswa per Sekolah tingkat Pendidikan SD dan SMP daerah Terdepan, 2017

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Sambas	Kalimantan Barat	174	209

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Sintang	Kalimantan Barat	131	186
Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	77	124
Kab. Bengkayang	Kalimantan Barat	133	169
Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	114	121
Kab. Maluku Tenggara Barat	Maluku	150	127
Kab. Kepulauan Aru	Maluku	106	134
Kab. Maluku Barat Daya	Maluku	84	97
Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	135	143
Kab. Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	146	187
Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	195	301
Kab. Alor	Nusa Tenggara Timur	104	110
Kab. Rote-Ndao	Nusa Tenggara Timur	145	251
Kab. Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	173	259
Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	140	219
Kab. Merauke	Papua	155	224
Kab. Boven Digoel	Papua	120	210
Kab. Peg. Bintang	Papua	145	118
Kab. Keerom	Papua	117	165
Kab. Supiori	Papua	102	145
Kab. Kep. Morotai	Maluku Utara	112	117
Kab. Raja Ampat	Papua Barat	93	107
Kab. Nunukan	Kalimantan Utara	169	194

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari Tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD mencapai 132 orang. Tetapi diperoleh tiga kabupaten dengan jumlah siswa yang paling rendah yaitu Kab. Kapuas Hulu, Kalbar (77), Kab. Maluku Barat Daya, Maluku (84) dan Kab. Raja Ampat, Papua Barat (93,68) orang.

2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 269 orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah adalah di Kab. Maluku Barat Daya yaitu 97 orang saja.
3. Dengan demikian, untuk daerah terdepan, pada tingkat pendidikan SD rata-rata jumlah siswa adalah 132 orang saja, sementara semakin ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi jumlah siswa semakin tinggi. Untuk SMP rata-rata jumlah siswa persekolah adalah 269 orang. Dari gambaran jumlah siswa persekolah seperti ini dapat ditunjukkan bahwa semakin tinggi rasio siswa dengan kelas maka semakin efisien proses belajar mengajar (PBM) di satu sekolah karena semakin intensif pemakaian sumberdaya yang ada.

b. Rasio Siswa per Sekolah Daerah Terluar

Tabel 4.6. Rasio Siswa per Sekolah tingkat Pendidikan SD dan SMP daerah Terluar, 2017

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Aceh Besar	Aceh	147	156
Kota Sabang	Aceh	154	173
Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	165	282
Kab. Bengkalis	Riau	223	281
Kab. Indragiri Hilir	Riau	146	159
Kab. Pelalawan	Riau	234	235
Kab. Rokan Hilir	Riau	232	213
Kab. Kepulauan Meranti	Riau	123	135
Kota Dumai	Riau	364	376
Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	114	180
Kab. Berau	Kalimantan Timur	182	237
Kab. Kep. Sangihe	Sulawesi Utara	56	90
Kab. Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	79	118
Kota Jayapura	Papua	348	416
Kab. Bintan	Kep. Riau	194	225

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Karimun	Kep. Riau	200	222
Kab. Natuna	Kep. Riau	116	162
Kab. Kep. Anambas	Kep. Riau	83	93
Kota Batam	Kep. Riau	390	314
Kab. Malinau	Kalimantan Utara	99	126

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari Tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD daerah terluar mencapai 186 orang. Akan tetapi diperoleh empat kabupaten dengan jumlah siswa yang paling rendah yaitu Kab. Kep. Sangihe, Sulawesi Utara (56), Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (79). Kab. Kepulauan Anambas, Kepri (83) dan Kab. Malinau, Maluku Utara (99) orang.
2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 218 orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah ada di Kab. Kep. Sangihe, Sulawesi Utara (90) dan Kab. Kepulauan Anambas, Kepri (93) orang.

Pada daerah terluar ini, pada tingkat pendidikan SD rata-rata jumlah siswa adalah 186 orang, sementara semakin ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi jumlah siswa semakin tinggi. Untuk SMP rata-rata jumlah siswa persekolah adalah 218 orang. Namun jika dilihat dari per kabupaten/kota, terjadi disparitas yang cukup tinggi antar daerah kota dan pedesaan dalam satu kabupaten. Pada kasus yang terjadi di Kab. Sanggau, Kalimantan Barat yang merupakan daerah terluar dan berbatasan dengan Malaysia, kondisi rasio siswa per sekolah masih terdapat penyebaran siswa yang tak merata antar wilayah.

Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD mencapai 112 orang. Tetapi diperoleh dua kecamatan dengan jumlah siswa yang paling rendah yaitu Kec. Noyah (76,84) dan Kec. Jangkang (80,38) orang. Demikian pula untuk SMP, rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SMP mencapai 166 orang. Akan tetapi diperoleh tiga kecamatan dengan jumlah siswa yang paling rendah yaitu Kec. Bonti (126), Kec. Jangkang (139,90) orang dan Kec. Mellau (128,54).

Dari hasil DKT yang dihimpun, rata-rata pengelola sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, serta guru) kurang memahami tentang pemanfaatan prasarana. Keterbatasan pengetahuan tersebut menyebabkan banyak bantuan sarana dan prasarana yang tak terpakai secara optimal yang berujung pada kerusakan pada sarana dan prasarana pembelajaran tersebut. Kondisi ini perlu diatasi dengan sedikit memberikan pelatihan bagi pengelola sekolah untuk memahami pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut.

c. Rasio Siswa per Sekolah Daerah Tertinggal

Tabel 4.7. Rasio Siswa per Sekolah tingkat Pendidikan SD dan SMP daerah Tertinggal, 2017.

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Bondowoso	Jawa Timur	114	201
Kab. Situbondo	Jawa Timur	111	242
Kab. Sampang	Jawa Timur	120	121
Kab. Bangkalan	Jawa Timur	151	166
Kab. Aceh Singkil	Aceh	156	177
Kab. Nias	Sumatera Utara	157	213
Kab. Nias Selatan	Sumatera Utara	140	157
Kab. Nias Barat	Sumatera Utara	138	177

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Nias Utara	Sumatera Utara	132	185
Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	127	189
Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat	136	157
Kab. Pasaman Barat	Sumatera Barat	209	234
Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan	143	258
Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	185	259
Kab. Lampung Barat	Lampung	143	196
Kab. Pesisir Barat	Lampung	151	180
Kab. Ketapang	Kalimantan Barat	121	177
Kab. Landak	Kalimantan Barat	100	205
Kab. Melawi	Kalimantan Barat	98	99
Kab. Kayong Utara	Kalimantan Barat	138	151
Kab. Seruyan	Kalimantan Tengah	121	122
Kab. Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	82	132
Kab. Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	89	107
Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	116	162
Kab. Buol	Sulawesi Tengah	113	124
Kab. ToliToli	Sulawesi Tengah	121	139
Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	130	168
Kab. Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	109	152
Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	108	154
Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	107	95
Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	96	130
Kab. Jeneponto	Sulawesi Selatan	150	179
Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	114	179
Kab. Bombana	Sulawesi Tenggara	119	119
Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	90	120
Kab. Maluku Tengah	Maluku	123	158
Kab. Buru	Maluku	129	142
Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	129	146
Kab. Seram Bagian Timur	Maluku	137	115
Kab. Buru Selatan	Maluku	121	106
Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	182	223
Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	150	151
Kab. Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	169	184
Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	132	183

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Dompu	Nusa Tenggara Barat	147	232
Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	131	188
Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	163	156
Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	162	206
Kab. Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	156	216
Kab. Ende	Nusa Tenggara Timur	107	169
Kab. Manggarai	Nusa Tenggara Timur	208	358
Kab. Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	152	213
Kab. Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	243	242
Kab. Lembata	Nusa Tenggara Timur	112	139
Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	151	205
Kab. Nagakeo	Nusa Tenggara Timur	113	156
Kab. Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	156	166
Kab. Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	303	253
Kab. Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	133	152
Kab. Biak Numfor	Papua	141	186
Kab. Kepulauan Yapen	Papua	124	220
Kab. Jaya wijaya	Papua	219	231
Kab. Nabire	Papua	189	177
Kab. Paniai	Papua	253	247
Kab. Puncak Jaya	Papua	196	143
Kab. Mappi	Papua	170	303
Kab. Asmat	Papua	143	144
Kab. Yahukimo	Papua	294	165
Kab. Tolikara	Papua	230	202
Kab. Sarmi	Papua	103	138
Kab. Waropen	Papua	92	122
Kab. Memberamo Raya	Papua	95	116
Kab. Nduga	Papua	230	81
Kab. Lanny Jaya	Papua	226	160
Kab. Membramo Tengah	Papua	142	104
Kab. Yalimo	Papua	155	131
kab. Puncak	Papua	128	145
Kab. Dogiyai	Papua	270	154
Kab. Deiyai	Papua	129	142
Kab. Intan Jaya	Papua	140	94

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Seluma	Bengkulu	122	188
Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	117	119
Kab. Halmahera Barat	Maluku Utara	86	101
Kab. Halmahera Selatan	Maluku Utara	127	113
Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	119	116
Kab. Kepulauan Sula	Maluku Utara	125	99
Kab. Pandeglang	Banten	164	295
Kab. Lebak	Banten	177	242
Kab. Boalemo	Gorontalo	117	119
Kab. Puhuwato	Gorontalo	126	135
Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	101	125
Kab. Teluk Wondama	Papua Barat	105	138
Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat	140	109
Kab. Sorong Selatan	Papua Barat	127	141
Kab. Sorong	Papua Barat	110	122
Kab. Tambrauw	Papua Barat	94	76
Kab. Maybrat	Papua Barat	81	90
Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	146	210
Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	128	173

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari tabel di atas dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk tingkat SD daerah tertinggal mencapai 142 orang. Akan tetapi didapat 10 (sepuluh) kabupaten dengan jumlah siswa yang rendah dibawah angka 100 yaitu Kab. Melawi, Kalimantan Barat. (98), Kab. Morowali Utara, Sulawesi Tengah (96), Kab. Memberamo Raya, Papua (95), Kab. Tambrauw, Papua Barat (94), Kab. Waropen, Papua (92), Kab. Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (90), Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (89), Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara (86), Kab.

Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (82) dan Kab. Maybrat, Papua Barat (81)

2. Untuk tingkat SMP rata-rata siswa per sekolah mencapai 174 orang, dengan jumlah siswa per sekolah terendah ada 7 (tujuh) kabupaten yakni Kab. Melawi, Kalimantan Barat (99), Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara (99), Kab. Banggai Laut, Sulawesi Tengah (95), Kab. Intan Jaya, Papua (94), Kab. Maybrat, Papua Barat (90), Kab. Nduga, Papua (81), Kab. Tambrauw, Papua Barat (76)

Untuk daerah tertinggal ini, pada tingkat pendidikan SD rata-rata jumlah siswa adalah 142 orang, sementara semakin ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi jumlah siswa semakin banyak. Untuk SMP rata-rata jumlah siswa per sekolah adalah 174 orang. Dari gambaran jumlah siswa per sekolah seperti ini dapat ditunjukkan bahwa semakin tinggi rasio siswa dengan kelas maka semakin efisien Proses Belajar Mengajar (PBM) di satu sekolah karena semakin intensif pemakaian sumber daya yang ada.

Dengan demikian, gambaran seperti ini untuk daerah yang rasionya tinggi menunjukkan bahwa masih diperlukan unit sekolah baru karena banyaknya siswa yang ditampung dalam sebuah sekolah. Rata-rata sekolah menerapkan pelaksanaan pembelajaran secara *double shift*. Kondisi ini tentu saja menyebabkan kurang efektifnya proses belajar mengajar karena kurangnya sumber daya yang ada.

2. Rasio Siswa per Kelas

Rasio Siswa per kelas didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan

tertentu. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di suatu sekolah/daerah. Indikatornya adalah semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi.

Bila mengacu pada Permendikbud No. 23 tahun 2013, maka jumlah siswa per kelas untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang peserta didik. Sedangkan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang peserta didik dalam satu kelasnya. Ketentuan ini sesungguhnya berkaitan dengan optimalisasi dari peran guru, khususnya guru bersertifikasi yang secara efektif didorong melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan memberi pengajaran pada kelas dengan jumlah siswa yang ideal. Ini mengacu pada PP tahun 2008 pasal 17 tentang guru sertifikasi. Kondisi siswa yang berlebih dalam satu kelas, akan memengaruhi kualitas proses belajar mengajar. Di mana tidak hanya peserta didik yang kesulitan, melainkan para pendidik juga akan merasakan tidak berkembangnya pengajaran yang diberikan. Sedangkan sekolah juga akan sedikit banyak mendapat dampak dalam hal pengaturan.

a. Rasio Siswa per Kelas Daerah Terdepan

Tabel 4.8. Rasio Siswa/Kelas SD dan SMP, Daerah Terdepan

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Kelas	
		SD	SMP
Kab. Sambas	Kalimantan Barat	24,7	27,9
Kab. Sintang	Kalimantan Barat	18,9	26,1
Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	13,9	23,5
Kab. Bengkayang	Kalimantan Barat	20,8	25,9
Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	17,9	25,5
Kab. Maluku Tenggara Barat	Maluku	22,2	21,2
Kab. Kepulauan Aru	Maluku	17,0	23,3
Kab. Maluku Barat Daya	Maluku	13,6	21,4

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Kelas	
		SD	SMP
Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	19,3	23,8
Kab. Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	18,9	24,9
Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	19,3	29,6
Kab. Alor	Nusa Tenggara Timur	17,8	22,2
Kab. Rote-Ndao	Nusa Tenggara Timur	19,7	26,4
Kab. Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	23,2	29,6
Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	17,4	29,0
Kab. Merauke	Papua	23,1	27,8
Kab. Boven Digoel	Papua	18,6	24,0
Kab. Pegunungan Bintang	Papua	24,1	23,6
Kab. Keerom	Papua	20,0	22,0
Kab. Supiori	Papua	16,8	24,5
Kab. Kepulauan Morotai	Maluku Utara	20,2	26,9
Kab. Raja Ampat	Papua Barat	16,0	24,4
Kab. Nunukan	Kalimantan Utara	22,1	29,2

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan mengamati tabel di atas dapat ditunjukkan hal-hal berikut:

1. Untuk jenjang pendidikan SD pada daerah terdepan, rasio siswa per kelas tertinggi terdapat di Kab, Sambas, Kalbar (24,7) dan Kab. Pegunungan Bintang (24,1), sementara terendah ada di Kab. Maluku Barat Daya, Maluku (13,6).
2. Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi berada di Kab. Belu, NTT (29,6) dan Kab. Sabu Raijua (29,6) dan terendah berada di Kab. Maluku Barat Daya, Maluku (21,4)

Untuk tingkat SD, dalam Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dinyatakan bahwa kapasitas maksimum ruang kelas untuk SD adalah 28 peserta didik

dan untuk SMP adalah 32 peserta didik. Pada Tabel diatas rata-rata rasio siswa per kelas untuk SD di daerah Terdepan adalah 19,4 dan SMP 25,6. Hal ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten di daerah Terdepan yang melebihi dari ketentuan tersebut standar Sarana dan prasarana tersebut.

Di sisi lain, angka ini juga menggambarkan bahwa untuk tingkat SD diperoleh gejala kekurangan siswa, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa terendah mencapai 13,6 di Kab. Maluku Barat Daya, Maluku. Kekurangan murid di sisi lain juga secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang dan fasilitas yang juga dapat disebut sebagai sarana dan prasarana belum termanfaatkan secara maksimal.

b. Rasio Siswa per Kelas, Daerah Terluar

Pada kategori daerah terluar, Rasio Siswa per kelas digunakan sebagai perbandingan antara jumlah seluruh siswa di Daerah Terluar dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan SD dan SMP daerah terluar. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di SD dan SMP daerah terluar. Indikatornya adalah semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi.

Tabel 4.9. Rasio Siswa per Kelas, Daerah Terluar, Tahun 2017

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Kelas	
		SD	SMP
Kab. Aceh Besar	Aceh	19,94	20,63
Kota Sabang	Aceh	20,76	20,47
Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	24,17	30,58
Kab. Bengkalis	Riau	25,27	26,28
Kab. Indragiri Hilir	Riau	21,30	26,02

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa / Kelas	
		SD	SMP
Kab. Pelalawan	Riau	26,36	30,20
Kab. Rokan Hilir	Riau	24,43	26,93
Kab. Kepulauan Meranti	Riau	17,77	22,89
Kota Dumai	Riau	33,02	30,74
Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	17,28	27,07
Kab. Berau	Kalimantan Timur	23,09	27,65
Kab. Kep. Sangihe	Sulawesi Utara	9,10	16,78
Kab. Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	12,49	19,85
Kota Jayapura	Papua	28,85	30,25
Kab. Bintan	Kepulauan Riau	24,47	26,75
Kab. Karimun	Kepulauan Riau	24,90	26,24
Kab. Natuna	Kepulauan Riau	17,02	18,57
Kab. Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	13,57	17,28
Kota Batam	Kepulauan Riau	34,89	34,22
Kab. Malinau	Kalimantan Utara	14,93	25,96

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan mengamati tabel di atas dapat ditunjukkan hal-hal berikut:

1. Untuk jenjang pendidikan SD pada daerah terluar, rasio siswa per kelas tertinggi terdapat di Kota Batam, Kepri (34,89) dan Kota Dumai, Riau (33,02), sementara terendah ada di Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (9,10).
2. Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi juga berada di Kota Batam, Kepulauan Riau (34,22) dan terendah berada di Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (16,78)

Kondisi sekolah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk tingkat SD (23,42) dan SMP (27,27) belum sesuai dengan Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah

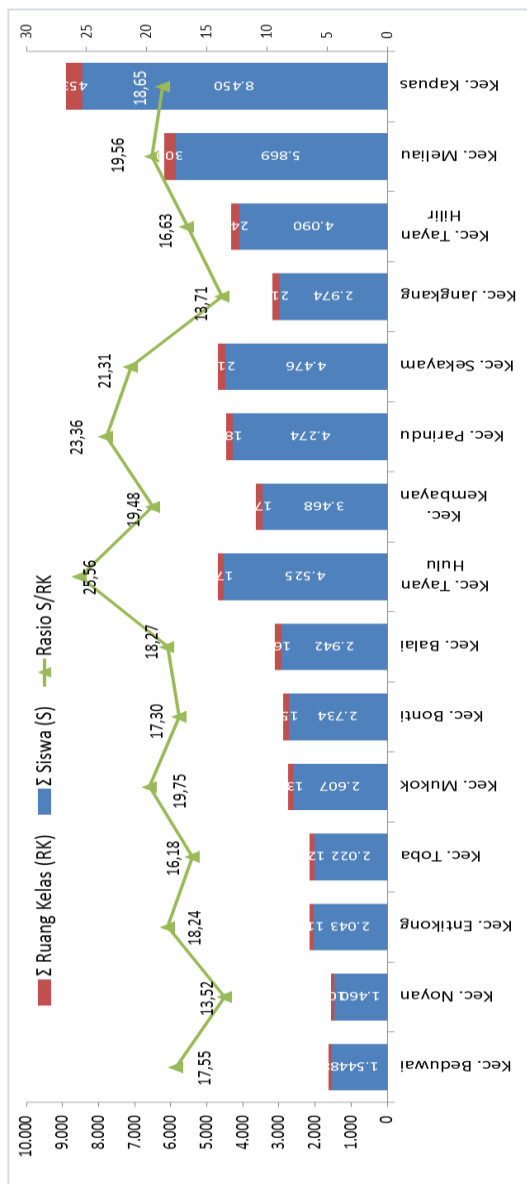
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang mempersyaratkan kapasitas maksimum ruang kelas untuk SD adalah 28 peserta didik dan untuk SMP adalah 32 peserta didik. Namun demikian, beberapa daerah seperti Kota Batam dan Kota Dumai menunjukkan bahwa daerah terdepan tersebut melebihi dari ketentuan standar Sarana dan prasarana.

Di sisi lain, angka ini juga menggambarkan bahwa untuk tingkat SD didapat gejala kekurangan siswa, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa terendah mencapai 9,10 di Kab. Kep. Sangehi, Sulawesi Utara. Kekurangan siswa di sisi lain juga secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang dan fasilitas yang juga dapat disebut sebagai sarana dan prasarana belum termanfaatkan secara maksimal.

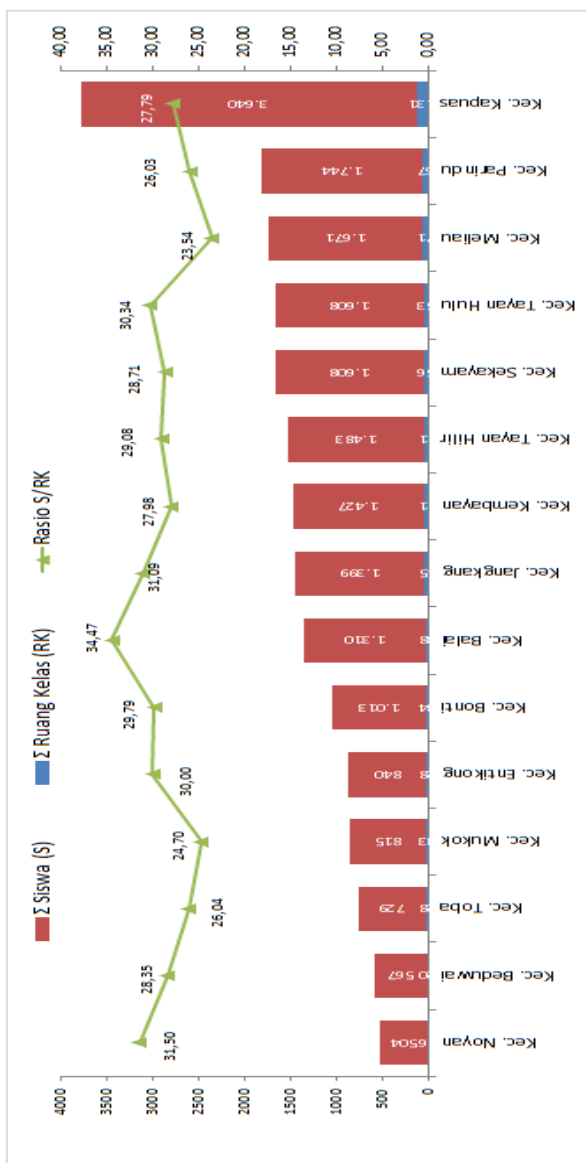
Jika dikaji lebih mendalam pada kecamatan di kabupaten/kota, terlihat bahwa ketimpangan rasio terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Kab. Sanggau, Kalimantan Barat yang merupakan daerah terluar dan juga merupakan daerah perbatasan dengan Negara Malaysia, memiliki disparitas yang cukup tinggi antar kecamatan. Sehingga kabupaten ini menjadi prioritas dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang.

Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat, terdapat 2 (dua) pintu perbatasan (*border gate*) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Sanggau memiliki fasilitas *Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)* dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk.

Grafik di bawah ini menunjukkan rasio siswa per ruang kelas yang tak seimbang. Angka rasio S/K jenjang SD di Kab. Sanggau di bawah nilai rata-rata dari standar yang ditetapkan, artinya semua siswa di setiap kecamatan dapat ditampung dalam satu ruang kelas. Rasio tertinggi ada di Kec. Tayan Hulu (25,36) dan terendah ada di Kec. Noyan (13,52). Dengan rata-rata rasio siswa per ruang kelas sebesar 18,78, kondisi ini menandakan bahwa hampir di setiap kecamatan kekurangan siswa. Kekurangan siswa di sisi lain juga secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang dan fasilitas yang juga dapat disebut sarana dan prasarana belum termanfaatkan secara maksimal.



Grafik 4.9. Rasio Siswa per Ruang Kelas SD, Kab. Sanggau, Kalbar, 2017.
Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.



Grafik 4.10. Rasio Siswa per Ruang Kelas SMP, Kab. Sanggau, Kalbar, 2017.

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Hasil Diskusi Kelompok Terpumpun yang dihimpun bersama dengan para kepala sekolah di Kabupaten Sanggau, Kalbar menunjukkan bahwa betapa banyaknya tuntutan orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah favorit, sehingga dengan banyaknya siswa dalam satu kelas menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan efektif dan siswa kurang mendapat perhatian dalam pembelajaran. Kepala sekolah disibukkan dengan paksaan orang tua untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah yang menurut orang tua sudah turun-temurun menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Selain itu, kondisi ini menyebabkan tidak meratanya penyebaran guru dan siswa.

Pada daerah tertinggal, Rasio Siswa per Kelas digunakan sebagai perbandingan antara jumlah seluruh siswa di daerah tertinggal dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan SD dan SMP daerah tertinggal. Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di SD dan SMP daerah tertinggal. Indikatornya adalah semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas makin tinggi.

Tabel 4.10. Rasio Siswa per Kelas, Daerah Tertinggal, Tahun 2017

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa/ Kelas	
		SD	SMP
Kab. Bondowoso	Jawa Timur	16,9	27,9
Kab. Situbondo	Jawa Timur	17,1	27,1
Kab. Sampang	Jawa Timur	20,2	28,0
Kab. Bangkalan	Jawa Timur	25,6	30,2
Kab. Aceh Singkil	Aceh	23,0	25,7
Kab. Nias	Sumatera Utara	19,2	26,6
Kab. Nias Selatan	Sumatera Utara	20,2	27,1
Kab. Nias Barat	Sumatera Utara	17,1	26,1
Kab. Nias Utara	Sumatera Utara	16,6	25,9
Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	16,4	27,2

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa/ Kelas	
		SD	SMP
Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat	18,7	21,0
Kab. Pasaman Barat	Sumatera Barat	24,9	26,0
Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan	20,7	29,2
Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	23,2	30,7
Kab. Lampung Barat	Lampung	19,5	23,3
Kab. Pesisir Barat	Lampung	20,3	22,8
Kab. Ketapang	Kalimantan Barat	19,9	27,8
Kab. Landak	Kalimantan Barat	17,4	29,0
Kab. Melawi	Kalimantan Barat	17,4	22,5
Kab. Kayong Utara	Kalimantan Barat	19,8	24,3
Kab. Seruyan	Kalimantan Tengah	16,6	21,4
Kab. Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	12,6	19,6
Kab. Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	13,6	20,0
Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	19,0	24,7
Kab. Buol	Sulawesi Tengah	17,5	21,6
Kab. ToliToli	Sulawesi Tengah	19,2	24,3
Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	20,6	26,0
Kab. Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	16,3	25,5
Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	18,1	23,2
Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	15,7	19,6
Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	14,5	21,6
Kab. Jeneponto	Sulawesi Selatan	23,3	23,2
Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	18,2	21,8
Kab. Bombana	Sulawesi Tenggara	19,0	22,5
Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	14,7	22,1
Kab. Maluku Tengah	Maluku	18,8	20,3
Kab. Buru	Maluku	22,5	24,1
Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	18,9	24,8
Kab. Seram Bagian Timur	Maluku	20,4	22,0
Kab. Buru Selatan	Maluku	21,1	22,7
Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	27,0	25,4
Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	23,8	23,3
Kab. Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	24,4	28,1
Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	20,6	25,6
Kab. Dompu	Nusa Tenggara Barat	21,3	26,0
Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	20,9	23,7

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa/ Kelas	
		SD	SMP
Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	22,2	21,6
Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	24,1	25,9
Kab. Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	21,0	29,8
Kab. Ende	Nusa Tenggara Timur	15,9	23,0
Kab. Manggarai	Nusa Tenggara Timur	23,1	36,1
Kab. Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	19,8	28,7
Kab. Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	22,5	28,6
Kab. Lembata	Nusa Tenggara Timur	16,3	21,5
Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	19,4	31,6
Kab. Nagakeo	Nusa Tenggara Timur	17,1	22,5
Kab. Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	17,9	23,4
Kab. Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	28,4	31,3
Kab. Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	19,1	31,7
Kab. Biak Numfor	Papua	21,0	29,1
Kab. Kepulauan Yapen	Papua	18,2	27,3
Kab. Jaya wijaya	Papua	33,0	32,7
Kab. Nabire	Papua	24,9	25,2
Kab. Paniai	Papua	37,8	29,7
Kab. Puncak Jaya	Papua	28,7	26,3
Kab. Mappi	Papua	28,7	31,2
Kab. Asmat	Papua	27,5	24,5
Kab. Yahukimo	Papua	39,8	36,1
Kab. Tolikara	Papua	33,8	32,2
Kab. Sarmi	Papua	16,6	27,6
Kab. Waropen	Papua	15,7	21,6
Kab. Memberamo Raya	Papua	36,1	32,3
Kab. Nduga	Papua	38,7	18,4
Kab. Lanny Jaya	Papua	36,6	33,9
Kab. Membramo Tengah	Papua	26,2	27,8
Kab. Yalimo	Papua	29,0	40,2
kab. Puncak	Papua	25,3	26,3
Kab. Dogiyai	Papua	41,2	27,7
Kab. Deiyai	Papua	23,9	31,9
Kab. Intan Jaya	Papua	25,8	22,7
Kab. Seluma	Bengkulu	18,5	24,4
Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	23,8	22,6

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Siswa/ Kelas	
		SD	SMP
Kab. Halmahera Barat	Maluku Utara	14,3	21,3
Kab. Halmahera Selatan	Maluku Utara	21,5	26,7
Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	18,6	21,6
Kab. Kepulauan Sula	Maluku Utara	19,8	20,5
Kab. Pandeglang	Banten	24,2	28,2
Kab. Lebak	Banten	26,8	27,6
Kab. Boalemo	Gorontalo	16,7	20,7
Kab. Pohuwato	Gorontalo	18,9	21,9
Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	16,2	22,6
Kab. Teluk Wondama	Papua Barat	16,0	22,7
Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat	22,6	21,7
Kab. Sorong Selatan	Papua Barat	22,5	22,9
Kab. Sorong	Papua Barat	19,1	21,9
Kab. Tambrauw	Papua Barat	16,8	16,9
Kab. Maybrat	Papua Barat	15,0	19,1
Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	21,0	26,9
Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	18,9	25,1

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan mengamati tabel di atas dapat menunjukkan:

1. Untuk jenjang pendidikan SD pada daerah tertinggal, rasio siswa per kelas tertinggi terdapat di Kab. Dogiyai Papua (41,2), sementara terendah ada di Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (12,6).
2. Untuk jenjang pendidikan SMP rasio tertinggi juga berada di Kab. Yalimo, Papua (40,2) dan terendah berada di Kab. Tambrauw, Papua Barat (16,9)

Namun jika dilihat per kabupaten/kota, beberapa daerah seperti Kab. Dogiyai, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Paniai, Kab. Lanny Jaya, Kab. Memberamo Raya, Kab. Tolikara, Kab. Jaya wijaya, Kab. Yalimo, Kab. Puncak Jaya, Kab. Mappi, dan Kab. Sumba Barat Daya, menunjukkan bahwa rata-rata rasio siswa per

kelas di daerah tersebut melebihi ketentuan standar sarana dan prasarana untuk tingkat pendidikan SD. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP, daerah yang melebihi ketentuan adalah Kab. Yalimo, Kab. Manggarai, Kab. Yalimo, Kab. Lanny Jaya, Kab. Jaya Wijaya, Kab. Memberamo Jaya dan Kab. Tolikara.

Kondisi ini menimbulkan kepadatan siswa hanya pada daerah tersebut. Indikasi yang terjadi adalah sulitnya keterjangkauan akses pendidikan pada daerah lain, sehingga banyak anak-anak usia sekolah yang bersekolah pada daerah tersebut. Di sisi lain, angka ini juga menggambarkan bahwa untuk tingkat SD didapat gejala kekurangan siswa, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa terendah mencapai 12,6 yang terjadi di Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kekurangan siswa disisi lain juga secara implisit menunjukkan adanya gejala kelebihan ruang yang mengakibatkan rasio siswa dengan kelas rendah. Artinya, ruang dan fasilitas yang juga dapat disebut sebagai sarana dan prasarana belum termanfaatkan secara maksimal.

3. Rasio Rombel per Sekolah

Rasio rombel per Sekolah digunakan untuk mengetahui ketersediaan kelas yang dibandingkan dengan jumlah rombel yang ada dalam suatu sekolah pada tingkat pendidikan SD dan SMP di daerah terdepan. Rasio rombel terhadap ruang kelas ini, jika lebih dari satu menunjukkan bahwa terdapat kelebihan rombel dari syarat yang ditentukan dalam SPM dan SNP. Dampak yang terjadi adalah pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan kelas rangkap (*double shift*). Dalam Permendiknas No. 24 tahun 2007 disebutkan bahwa satu SD memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar dan satu SMP/MTs

memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.

a. Rasio Rombel per Sekolah Daerah Terdepan

Tabel 4.11. Rasio Rombel/Sekolah SD dan SMP Daerah Terdepan, 2017

Kabupaten/Kota	Provinsi	Rasio Rombel/Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Sambas	Kalimantan Barat	7,4	7,4
Kab. Singang	Kalimantan Barat	6,8	6,8
Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	6,1	5,0
Kab. Bengkayang	Kalimantan Barat	6,6	6,2
Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	6,7	4,9
Kab. Maluku Tenggara Barat	Maluku	6,6	5,3
Kab. Kepulauan Aru	Maluku	6,6	5,4
Kab. Maluku Barat Daya	Maluku	6,2	4,4
Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	7,0	5,9
Kab. Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	6,9	7,4
Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	9,1	10,7
Kab. Alor	Nusa Tenggara Timur	6,3	4,9
Kab. Rote-Ndao	Nusa Tenggara Timur	7,2	9,6
Kab. Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	7,3	9,4
Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	6,9	8,4
Kab. Merauke	Papua	7,2	8,6
Kab. Boven Digoel	Papua	6,9	7,7
Kab. Pegunungan Bintang	Papua	6,4	4,5
Kab. Keerom	Papua	6,4	7,1
Kab. Supiori	Papua	6,1	5,9
Kab. Kepulauan Morotai	Maluku Utara	6,1	5,0
Kab. Raja Ampat	Papua Barat	6,2	4,3
Kab. Nunukan	Kalimantan Utara	8,3	7,3

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa:

1. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SD untuk daerah terdepan adalah 6,9, dimana daerah yang memiliki rasio tertinggi terdapat di Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (9,1) dan terendah berada di Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (6,1).
2. Rata-rata rasio robel per sekolah tingkat SMP untuk daerah terdepan adalah 6,5, dimana daerah yang memiliki rasio tertinggi juga di Kab. Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur (10,7) dan terendah ada di Kab. Raja Ampat, Papua Barat (4,3).

Jika dilihat dari rata-rata rasio rombel per sekolah baik SD maupun SMP di daerah terdepan telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Permendiknas tersebut yang mensyaratkan minumum 6 rombel dalam satu sekolah untuk SD dan 3 minimum rombel dalam satu SMP.

b. Rasio Rombel per Sekolah Daerah Terluar

Pada rasio rombel terhadap ruang kelas di daerah terluar ini, jika lebih dari satu menunjukkan bahwa terdapat kelebihan rombel dari syarat yang di tentukan dalam SPM dan SNP.

Tabel 4.12. Rasio Rombel per Sekolah SD dan SMP Daerah Terluar, 2017

Kabupaten/Kota	Provinsi	Rasio Rombel/Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Aceh Besar	Aceh	7,36	6,64
Kota Sabang	Aceh	7,20	7,67
Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	7,04	9,01
Kab. Bengkalis	Riau	9,35	10,09
Kab. Indragiri Hilir	Riau	7,46	6,25
Kab. Pelalawan	Riau	9,95	8,20
Kab. Rokan Hilir	Riau	9,67	7,72
Kab. Kepulauan Meranti	Riau	6,82	5,83
Kota Dumai	Riau	14,15	12,46

Kabupaten/Kota	Provinsi	Rasio Rombel/Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	6,60	6,46
Kab. Berau	Kalimantan Timur	8,46	8,63
Kab. Kep. Sangihe	Sulawesi Utara	6,00	4,46
Kab. Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	6,16	5,51
Kota Jayapura	Papua	11,84	13,06
Kab. Bintan	Kepulauan Riau	8,67	8,13
Kab. Karimun	Kepulauan Riau	9,44	8,06
Kab. Natuna	Kepulauan Riau	6,88	6,62
Kab. Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	6,32	4,48
Kota Batam	Kepulauan Riau	13,29	9,50
Kab. Malinau	Kalimantan Utara	6,70	4,97

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa:

1. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SD untuk daerah terluar adalah 8,44, di mana daerah yang memiliki rasio tertinggi terdapat di Kota Dumai. Riau (14,15) dan terendah berada di Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (6,0).
2. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SMP untuk daerah terluar adalah 7,77, di mana daerah yang memiliki rasio tertinggi juga di Kota Jayapura, Papua (13,06) dan terendah ada di Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (4,46).

Jika dilihat dari rata-rata rasio rombel per sekolah baik SD maupun SMP di daerah terluar telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Permendiknas tersebut yang mensyaratkan minimum 6 rombel dalam satu sekolah untuk SD dan 3 minimum rombel dalam satu SMP.

c. Rasio Rombel per Sekolah Daerah Tertinggal

Pada rasio rombel terhadap ruang kelas di daerah terpencil ini, jika lebih dari satu menunjukkan bahwa terdapat kelebihan rombel dari syarat yang di tentukan dalam SPM dan SNP.

Tabel 4.13. Rasio Rombel perSekolah SD dan SMP Daerah Tertinggal 2017

Kabupaten / Kota	Nama Provinsi	Rasio Rombel/Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Bondowoso	Jawa Timur	6,69	7,73
Kab. Situbondo	Jawa Timur	6,50	9,37
Kab. Sampang	Jawa Timur	6,13	4,86
Kab. Bangkalan	Jawa Timur	6,47	6,21
Kab. Aceh Singkil	Aceh	7,04	6,86
Kab. Nias	Sumatera Utara	7,58	7,49
Kab. Nias Selatan	Sumatera Utara	6,74	5,80
Kab. Nias Barat	Sumatera Utara	7,51	6,92
Kab. Nias Utara	Sumatera Utara	7,22	6,88
Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	7,63	7,54
Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat	7,46	6,34
Kab. Pasaman Barat	Sumatera Barat	8,64	8,72
Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan	6,85	8,72
Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	8,18	9,31
Kab. Lampung Barat	Lampung	7,12	7,67
Kab. Pesisir Barat	Lampung	7,43	6,92
Kab. Ketapang	Kalimantan Barat	6,87	6,39
Kab. Landak	Kalimantan Barat	6,06	6,77
Kab. Melawi	Kalimantan Barat	6,44	4,26
Kab. Kayong Utara	Kalimantan Barat	7,29	6,15
Kab. Seruyan	Kalimantan Tengah	6,78	5,14
Kab. Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	6,39	5,93
Kab. Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	6,17	4,88
Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	6,28	6,27
Kab. Buol	Sulawesi Tengah	6,25	5,35
Kab. ToliToli	Sulawesi Tengah	6,50	5,64
Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	6,51	6,58
Kab. Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	6,43	5,82
Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	6,38	6,42

Kabupaten / Kota	Nama Provinsi	Rasio Rombel/Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	6,49	4,53
Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	6,31	5,57
Kab. Jeneponto	Sulawesi Selatan	6,61	7,07
Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	6,40	7,39
Kab. Bombana	Sulawesi Tenggara	6,58	5,29
Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	6,00	5,06
Kab. Maluku Tengah	Maluku	6,53	6,85
Kab. Buru	Maluku	6,73	6,02
Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	6,57	6,02
Kab. Seram Bagian Timur	Maluku	6,59	4,75
Kab. Buru Selatan	Maluku	6,28	4,26
Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	7,32	8,32
Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	6,58	6,44
Kab. Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	7,17	6,97
Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	6,65	7,03
Kab. Dompu	Nusa Tenggara Barat	6,87	8,89
Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	6,44	7,84
Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	7,51	6,55
Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	6,86	7,42
Kab. Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	6,97	7,61
Kab. Ende	Nusa Tenggara Timur	6,36	6,75
Kab. Manggarai	Nusa Tenggara Timur	8,47	12,32
Kab. Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	7,27	7,57
Kab. Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	9,31	8,30
Kab. Lembata	Nusa Tenggara Timur	6,49	5,61
Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	7,46	7,78
Kab. Nagakeo	Nusa Tenggara Timur	6,33	6,34
Kab. Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	7,79	6,27
Kab. Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	9,85	7,86
Kab. Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	6,69	6,07
Kab. Biak Numfor	Papua	6,73	6,35
Kab. Kepulauan Yapen	Papua	6,69	7,44
Kab. Jaya wijaya	Papua	6,84	6,94
Kab. Nabire	Papua	7,81	6,81
Kab. Paniai	Papua	7,23	7,50
Kab. Puncak Jaya	Papua	6,74	5,71

Kabupaten / Kota	Nama Provinsi	Rasio Rombel/Sekolah	
		SD	SMP
Kab. Mappi	Papua	6,88	10,53
Kab. Asmat	Papua	6,27	5,61
Kab. Yahukimo	Papua	7,52	4,61
Kab. Tolikara	Papua	6,44	5,72
Kab. Sarmi	Papua	6,50	5,35
Kab. Waropen	Papua	6,37	5,71
Kab. Memberamo Raya	Papua	6,11	4,21
Kab. Nduga	Papua	7,36	4,00
Kab. Lanny Jaya	Papua	5,97	4,52
Kab. Membramo Tengah	Papua	6,03	3,88
Kab. Yalimo	Papua	6,74	4,20
kab. Puncak	Papua	5,52	5,83
Kab. Dogiyai	Papua	7,33	4,92
Kab. Deiyai	Papua	5,47	4,55
Kab. Intan Jaya	Papua	5,50	3,71
Kab. Seluma	Bengkulu	6,56	7,23
Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	6,04	5,14
Kab. Halmahera Barat	Maluku Utara	6,12	4,66
Kab. Halmahera Selatan	Maluku Utara	6,29	4,67
Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	6,45	4,84
Kab. Kepulauan Sula	Maluku Utara	6,34	4,52
Kab. Pandeglang	Banten	6,97	10,05
Kab. Lebak	Banten	7,07	8,17
Kab. Boalemo	Gorontalo	6,33	5,37
Kab. Pohuwato	Gorontalo	6,46	5,74
Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	6,30	5,46
Kab. Teluk Wondama	Papua Barat	6,35	5,57
Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat	7,20	5,18
Kab. Sorong Selatan	Papua Barat	6,30	5,80
Kab. Sorong	Papua Barat	6,30	5,40
Kab. Tambrauw	Papua Barat	5,82	3,93
Kab. Maybrat	Papua Barat	5,79	4,31
Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	6,89	7,89
Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	6,75	6,81

Sumber: PDSPPK, Kemdikbud, 2017. lwa:

1. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SD untuk daerah tertinggal adalah 6,79, di mana daerah yang memiliki rasio tertinggi terdapat di Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (9,85) dan terendah berada di Kab. Deiyai, Papua (5,47).
2. Rata-rata rasio rombel per sekolah tingkat SMP untuk daerah tertinggal adalah 6,65, di mana daerah yang memiliki rasio tertinggi juga di Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur (12,32) dan terendah ada di Kab. Intan Jaya, Papua (3,71).

Jika dilihat dari rata-rata rasio rombel per sekolah baik SD maupun SMP di daerah tertinggal telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Permendiknas tersebut yang mensyaratkan minimum 6 rombel dalam satu sekolah untuk SD dan 3 minimum rombel dalam satu SMP.

4. Rasio Ruang Kelas per Rombel

Rombel adalah kelompok peserta didik (murid/siswa) yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan (jenjang pendidikan). Idealnya angka rasio ini adalah 1 (satu). Angka rasio lebih dari satu menunjukkan rombel yang lebih banyak dari ruang kelas yang tersedia atau terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan. Kekurangan ruang kelas biasanya diatasi dengan penggunaan ruang kelas secara bergantian. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki. Kegunaan untuk mengetahui kekurangan/kelebihan ruang kelas di sekolah dan wilayah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan prioritas sekolah mana yang akan diberi tambahan ruang kelas.

a. Rasio Ruang Kelas per Rombel Daerah Terdepan

Tabel berikut menggambarkan rasio Ruang Kelas per rombongan belajar untuk daerah terdepan.

Tabel 4.14. Rasio Ruang Kelas/Rombel SD dan SMP Daerah Terdepan, 2017

Kabupaten / Kota	Provinsi	Rasio Ruang Kelas/Rombel	
		SD	SMP
Kab. Sambas	Kalimantan Barat	1,1	1,0
Kab. Sintang	Kalimantan Barat	1,0	0,9
Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	1,1	1,0
Kab. Bengkayang	Kalimantan Barat	1,0	1,0
Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	1,1	1,0
Kab. Maluku Tenggara Barat	Maluku	1,0	0,9
Kab. Kepulauan Aru	Maluku	1,1	0,9
Kab. Maluku Barat Daya	Maluku	1,0	1,0
Kab. Kupang	Nusa Tenggara Timur	1,0	1,0
Kab. Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	0,9	1,0
Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	0,9	1,0
Kab. Alor	Nusa Tenggara Timur	1,1	1,0
Kab. Rote-Ndao	Nusa Tenggara Timur	1,0	1,0
Kab. Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	1,0	1,1
Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	0,9	1,1
Kab. Merauke	Papua	1,1	1,1
Kab. Boven Digoel	Papua	1,1	0,9
Kab. Pegunungan Bintang	Papua	1,1	0,9
Kab. Keerom	Papua	1,1	0,9
Kab. Supiori	Papua	1,0	1,0
Kab. Kepulauan Morotai	Maluku Utara	1,1	1,1
Kab. Raja Ampat	Papua Barat	1,1	1,0
Kab. Nunukan	Kalimantan Utara	1,1	1,1

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan memperhatikan rasio siswa per rombel dengan rasio rombel per ruang kelas, menunjukkan bahwa ketersediaan ruang kelas di beberapa daerah terdepan cukup ideal mengingat rata-rata

rasio ini tidak melebihi angka 1 sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendiknas No. 24 tahun 2007. Hanya beberapa daerah yang rasionya di bawah angka satu namun jumlahnya tidak signifikan, hanya 0,9.

Dari tabel di atas menunjukkan kondisi sekolah dengan jumlah ruang yang lebih menunjukkan tidak efisien, artinya terdapat sejumlah ruang kelas tidak dimanfaatkan secara optimal, namun di sisi lain kekurangan ruang kelas cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa di beberapa sekolah masih menggunakan sistem *double shift*, dilihat dari efektivitas pengajaran kelas dengan *double shift* jam belajarnya tidak optimal.

b. Rasio Ruang Kelas per Rombel Daerah Terluar

Rasio Ruang Kelas per Rombel digunakan untuk melihat kecukupan ruang kelas yang tersedia baik di SD maupun di SMP pada daerah terluar. Angka rasio lebih dari 1 (satu) menunjukkan rombongan yang lebih banyak dari ruang kelas yang tersedia. Kekurangan ruang kelas biasanya diatasi dengan penggunaan ruang kelas secara bergantian. Tabel berikut menggambarkan rasio Ruang Kelas per rombongan belajar untuk daerah terluar.

Tabel 4.15. Rasio Ruang Kelas per Rombel SD dan SMP Daerah Terluar, 2017

Kabupaten/Kota	Provinsi	Rasio R. Kelas/Rombel	
		SD	SMP
Kab. Aceh Besar	Aceh	0,99	0,88
Kota Sabang	Aceh	0,97	0,91
Kab. Serdang Bedagai	Sumatera Utara	1,03	0,98
Kab. Bengkalis	Riau	1,06	0,95
Kab. Indragiri Hilir	Riau	1,09	1,02
Kab. Pelalawan	Riau	1,12	1,05

Kabupaten/Kota	Provinsi	Rasio R. Kelas/Rombel	
		SD	SMP
Kab. Rokan Hilir	Riau	1,02	0,98
Kab. Kepulauan Meranti	Riau	0,98	0,99
Kota Dumai	Riau	1,28	1,02
Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	1,00	0,97
Kab. Berau	Kalimantan Timur	1,07	1,00
Kab. Kep. Sangihe	Sulawesi Utara	0,97	0,83
Kab. Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	0,97	0,93
Kota Jayapura	Papua	0,98	0,95
Kab. Bintan	Kepulauan Riau	1,10	0,97
Kab. Karimun	Kepulauan Riau	1,17	0,95
Kab. Natuna	Kepulauan Riau	1,01	0,76
Kab. Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	1,03	0,83
Kota Batam	Kepulauan Riau	1,19	1,03
Kab. Malinau	Kalimantan Utara	1,01	1,02

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Beberapa daerah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ketersediaan Sarpras, baik di tingkat SD maupun SMP yakni Kota Dumai, Riau (SD 1,28), Kota Batam, Kepri (SD 1,19), Kab. Karimun, Kepri (SD 1,17), Kab. Palalawan, Riau (SD 1,12). Tingginya angka rasio yang melebihi angka 1 ini menunjukkan banyaknya ruang kelas yang digunakan beberapa kali oleh rombongan belajar. Artinya, pemerintah perlu menambah ruang kelas baru untuk mengatasi hal tersebut.

Namun untuk mengatasi hal tersebut, tidak mudah. Hasil DKT dengan peserta di Kab. Sanggau, Kalbar menjelaskan bahwa beberapa sekolah terutama yang berada di perkotaan sudah cukup sulit untuk mendapatkan lahan pembangunan ruang kelas baru. Umumnya sekolah berdiri di lingkungan perumahan yang padat penduduk. Sekolah sudah membangun ke atas, namun kapasitas untuk menampung siswa tidak memadai. Selain itu, sekolah merasa

beruntung jika memiliki jumlah siswa yang banyak. Dengan siswa yang banyak, maka jumlah yang terdata di Dapodik juga banyak, sehingga sekolah bisa memperoleh bantuan yang cukup banyak.

Kondisi ini menyebabkan ketimpangan bagi sekolah lain yang di pinggiran dalam satu kabupaten yang tidak mendapatkan siswa karena selain jauh, sekolah juga dianggap tidak favorit. Dengan sedikitnya jumlah siswa, maka sedikit pula bantuan yang akan diterima dari Pusat, karena bantuan sarpras berdasarkan data Dapodik.

c. Rasio Ruang Kelas per Rombel Daerah Tertinggal

Rasio Ruang Kelas per Rombel digunakan untuk melihat kecukupan ruang kelas yang tersedia bagik di SD mapun di SMP pada daerah tertinggal. Angka rasio lebih dari 1 (satu) menunjukkan rombongan belajar yang lebih banyak dari ruang kelas yang tersedia. Tabel berikut menggambarkan rasio Ruang Kelas per rombongan belajar untuk daerah tertinggal, Tahun 2017.

Tabel 4.16. Rasio Ruang Kelas per Rombel SD dan SMP, Daerah Tertinggal, 2017

Kabupaten / Kota	Nama Provinsi	Rasio Kelas / Rombel	
		SD	SMP
Kab. Bondowoso	Jawa Timur	0,99	1,07
Kab. Situbondo	Jawa Timur	1,00	1,05
Kab. Sampang	Jawa Timur	1,04	1,13
Kab. Bangkalan	Jawa Timur	1,10	1,13
Kab. Aceh Singkil	Aceh	1,04	1,00
Kab. Nias	Sumatera Utara	0,93	0,93
Kab. Nias Selatan	Sumatera Utara	0,97	1,00
Kab. Nias Barat	Sumatera Utara	0,93	1,02
Kab. Nias Utara	Sumatera Utara	0,91	0,96

Kabupaten / Kota	Nama Provinsi	Rasio Kelas / Rombel	
		SD	SMP
Kab. Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	0,99	1,08
Kab. Solok Selatan	Sumatera Barat	1,03	0,85
Kab. Pasaman Barat	Sumatera Barat	1,03	0,97
Kab. Musi Rawas	Sumatera Selatan	0,99	0,99
Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	1,03	1,11
Kab. Lampung Barat	Lampung	0,97	0,91
Kab. Pesisir Barat	Lampung	1,00	0,87
Kab. Ketapang	Kalimantan Barat	1,13	1,00
Kab. Landak	Kalimantan Barat	1,05	0,96
Kab. Melawi	Kalimantan Barat	1,14	0,97
Kab. Kayong Utara	Kalimantan Barat	1,05	0,99
Kab. Seruyan	Kalimantan Tengah	0,93	0,90
Kab. Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	0,98	0,88
Kab. Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	0,95	0,91
Kab. Donggala	Sulawesi Tengah	1,03	0,96
Kab. Buol	Sulawesi Tengah	0,97	0,93
Kab. ToliToli	Sulawesi Tengah	1,04	0,98
Kab. Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	1,03	1,01
Kab. Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	0,96	0,98
Kab. Sigi	Sulawesi Tengah	1,06	0,97
Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	0,96	0,94
Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	0,96	0,92
Kab. Jeneponto	Sulawesi Selatan	1,02	0,92
Kab. Konawe	Sulawesi Tenggara	1,03	0,90
Kab. Bombana	Sulawesi Tenggara	1,05	1,00
Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	0,98	0,93
Kab. Maluku Tengah	Maluku	1,00	0,88
Kab. Buru	Maluku	1,17	1,02
Kab. Seram Bagian Barat	Maluku	0,97	1,02
Kab. Seram Bagian Timur	Maluku	0,98	0,91
Kab. Buru Selatan	Maluku	1,09	0,91
Kab. Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	1,08	0,95

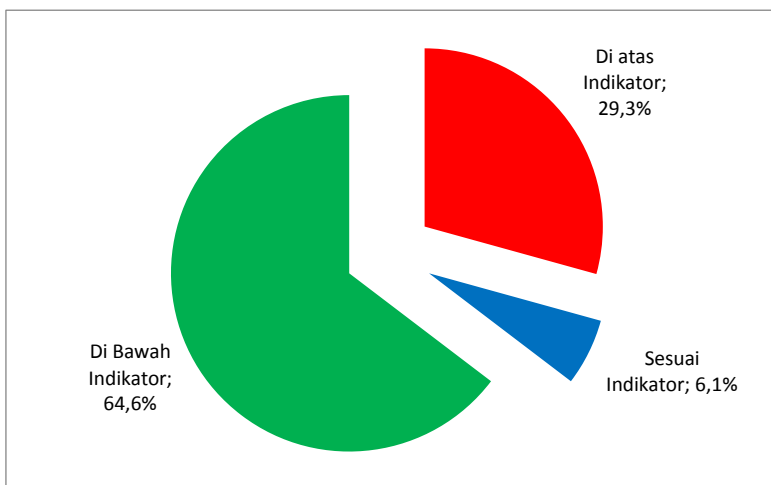
Kabupaten / Kota	Nama Provinsi	Rasio Kelas / Rombel	
		SD	SMP
Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	1,04	1,00
Kab. Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	1,04	1,07
Kab. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	1,04	0,98
Kab. Dompu	Nusa Tenggara Barat	1,00	1,00
Kab. Bima	Nusa Tenggara Barat	1,03	0,99
Kab. Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	1,02	0,91
Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	1,02	0,93
Kab. Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	0,94	1,05
Kab. Ende	Nusa Tenggara Timur	0,95	0,92
Kab. Manggarai	Nusa Tenggara Timur	0,94	1,24
Kab. Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	0,95	1,02
Kab. Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	0,86	0,98
Kab. Lembata	Nusa Tenggara Timur	0,94	0,87
Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	0,96	1,20
Kab. Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	0,95	0,91
Kab. Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	0,89	0,88
Kab. Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	0,93	0,97
Kab. Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	0,96	1,26
Kab. Biak Numfor	Papua	1,00	0,99
Kab. Kepulauan Yapen	Papua	0,98	0,92
Kab. Jaya wijaya	Papua	1,03	0,98
Kab. Nabire	Papua	1,03	0,97
Kab. Paniai	Papua	1,08	0,90
Kab. Puncak Jaya	Papua	0,99	1,05
Kab. Mappi	Papua	1,16	1,08
Kab. Asmat	Papua	1,21	0,95
Kab. Yahukimo	Papua	1,02	1,01
Kab. Tolikara	Papua	0,95	0,91
Kab. Sarmi	Papua	1,05	1,07
Kab. Waropen	Papua	1,09	1,01
Kab. Memberamo Raya	Papua	2,31	1,18
Kab. Nduga	Papua	1,24	0,90

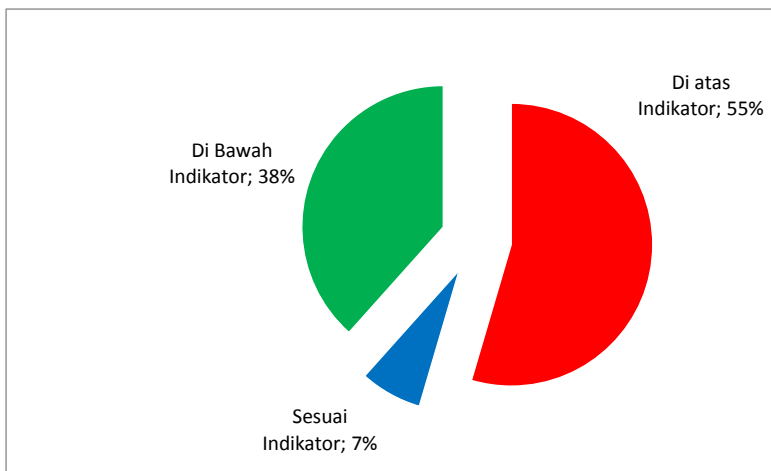
Kabupaten / Kota	Nama Provinsi	Rasio Kelas / Rombel	
		SD	SMP
Kab. Lanny Jaya	Papua	0,97	0,96
Kab. Membramo Tengah	Papua	1,11	1,03
Kab. Yalimo	Papua	1,26	1,29
kab. Puncak	Papua	1,10	1,06
Kab. Dogiyai	Papua	1,12	0,89
Kab. Deiyai	Papua	1,01	1,02
Kab. Intan Jaya	Papua	1,01	0,90
Kab. Seluma	Bengkulu	0,99	0,94
Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	1,22	0,97
Kab. Halmahera Barat	Maluku Utara	1,01	0,98
Kab. Halmahera Selatan	Maluku Utara	1,06	1,10
Kab. Halmahera Timur	Maluku Utara	1,00	0,90
Kab. Kepulauan Sula	Maluku Utara	1,01	0,94
Kab. Pandeglang	Banten	1,03	0,96
Kab. Lebak	Banten	1,07	0,93
Kab. Boalemo	Gorontalo	0,90	0,93
Kab. Pohuwato	Gorontalo	0,97	0,93
Kab. Gorontalo Utara	Gorontalo	1,01	0,98
Kab. Teluk Wondama	Papua Barat	0,97	0,92
Kab. Teluk Bintuni	Papua Barat	1,16	1,04
Kab. Sorong Selatan	Papua Barat	1,12	0,94
Kab. Sorong	Papua Barat	1,09	0,97
Kab. Tambrau	Papua Barat	1,04	0,88
Kab. Maybrat	Papua Barat	1,07	0,92
Kab. Polewali Mandar	Sulawesi Barat	0,99	1,01
Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	1,00	0,99

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Dengan memperhatikan rasio siswa per rombel dengan rasio rombel per ruang kelas pada daerah tertinggal, menunjukkan bahwa ketersediaan ruang kelas di beberapa daerah tertinggal cukup ideal mengingat rata-rata rasio ini tidak melebihi angka 1

sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendiknas No. 24 tahun 2007 tersebut. Hanya beberapa daerah yang rasionya di bawah angka satu namun jumlahnya tidak signifikan, hanya 0,8. Namun jika diamati per kabupaten/kota terdapat beberapa Kabupaten/kota yang rombelnya berlebih dan tidak mendapatkan ruang kelas, sehingga diindikasikan oleh sekolah untuk dilaksanakan secara bergantian (pagi dan siang). Untuk tingkat pendidikan SD terdapat 7% daerah yang sesuai indikator, di atas indikator terdapat 55% daerah dan di bawah indikator terdapat 38% daerah. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP terdapat 29% daerah yang melebihi rasio indikator, 6,1% daerah yang sesuai indikator dan 64,6% di bawah indikator.



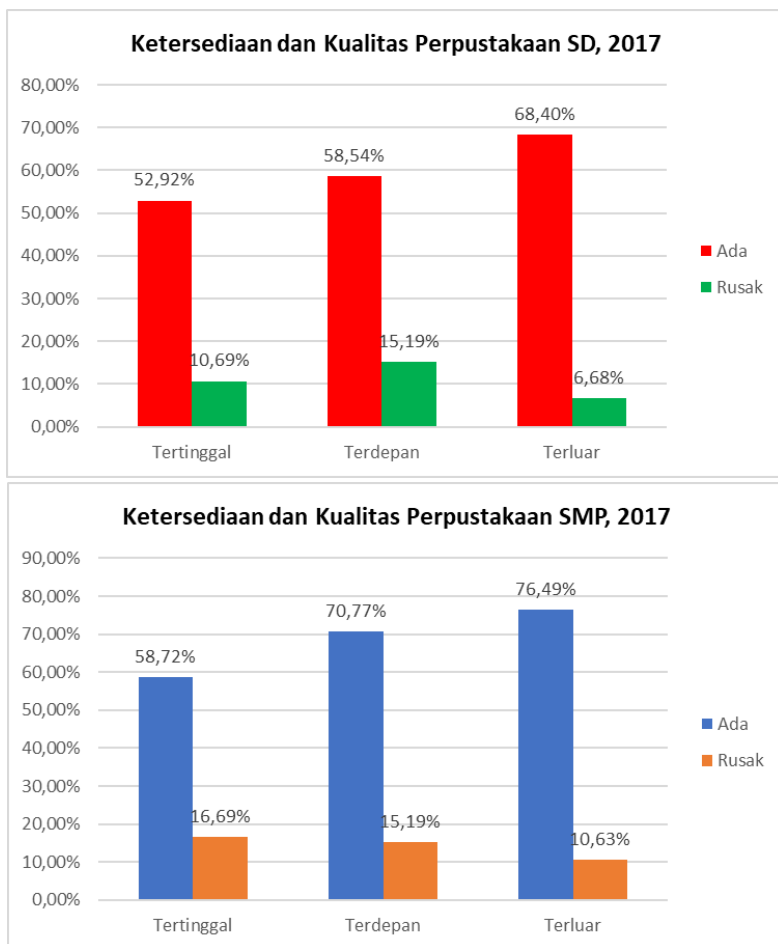


Grafik 4.11. (SD-SMP) Kesesuaian Indikator Rasio Rombel Per Ruang Kelas SD dan SMP, Daerah Tertinggal, tahun 2017

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

5. Ketersediaan Perpustakaan

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara jumlah perpustakaan (Perpus) di daerah 3T dengan jumlah sekolah yang ada, dan dinyatakan dalam persentase. Intinya rasio ini digunakan untuk mengetahui sekolah yang belum memiliki perpustakaan.



Grafik 4.12. Ketersediaan dan Kualitas Perpustakaan Daerah 3T
 Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Sama halnya dengan SD, ketersediaan Perpustakaan untuk tingkat pendidikan SMP belum seluruh sekolah di daerah 3T memiliki perpustakaan. Pada daerah terluar terdapat 76,49% dari keseluruhan sekolah memiliki Perpustakaan dengan kondisi rusak sebanyak 10,63%. Daerah terdepan hanya 70,77% dari seluruh SMP

yang memiliki Perpustakaan dan mengalami kerusakan sebanyak 15,19%. Pada daerah tertinggal hanya 58,72% SMP yang memiliki perpustakaan dengan kondisi rusak sebanyak 16,69%.

a. Ketersediaan Perpustakaan Daerah Terdepan

Pada daerah terdepan, baru terdapat 58,5% atau sebanyak 2.451 sekolah yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan sebanyak 4.187 sekolah. Dari jumlah 2.451 perpustakaan, dalam kondisi baik (25,4%), rusak ringan (55,3%), rusak sedang (6,7%), rusak berat (7%), dan Rusak total (5,6%). Sementara untuk tingkat SMP di daerah terdepan, terdapat 70,77% atau sebanyak 961 sekolah yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.358 SMP. Dari jumlah 961 perpustakaan, dalam kondisi baik (23,8%), rusak ringan (54,8%), rusak sedang (6,1%), rusak berat (8,1%), dan rusak total (7,1%). Berikut uraian kondisi perpustakaan di setiap kabupaten di daerah terdepan.

Tabel 4.17. Ketersediaan Perpustakaan SD di Daerah Terdepan, 2017

Nama Provinsi	Kab/ Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Kalimantan Barat	Kab. Sambas	366	292	30%	56%	6%	5%	2%
Kalimantan Barat	Kab. Sintang	430	237	14%	62%	8%	9%	7%
Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	409	240	30%	60%	4%	2%	4%
Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	274	174	25%	52%	7%	10%	6%
Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	39	57	23%	35%	16%	16%	11%
Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	120	65	23%	55%	5%	9%	8%
Maluku	Kab. Kepulauan Aru	140	79	67%	20%	4%	3%	6%

Nama Provinsi	Kab/ Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	153	46	30%	57%	0%	4%	9%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	358	233	27%	52%	6%	7%	7%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	263	205	20%	54%	12%	7%	8%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	145	113	37%	46%	5%	5%	6%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	275	86	7%	59%	9%	17%	7%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	143	100	17%	60%	6%	9%	8%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	77	82	30%	61%	5%	4%	0%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	207	95	18%	65%	6%	4%	6%
Papua	Kab. Merauke	198	74	27%	61%	4%	5%	3%
Papua	Kab. Boven Digoel	98	30	33%	50%	7%	7%	3%
Papua	Kab. Peg. Bintang	60	5	60%	40%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Keerom	72	32	19%	63%	9%	6%	3%
Papua	Kab. Supiori	40	41	10%	61%	7%	12%	10%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Morotai	82	50	38%	44%	6%	8%	4%
Papua Barat	Kab. Raja Ampat	106	19	5%	47%	16%	16%	16%
Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	132	96	18%	71%	4%	5%	2%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

b. Ketersediaan Perpustakaan Daerah Terluar

Pada daerah terluar, terdapat 2.786 sekolah yang memiliki Perpustakaan atau baru sebesar 68,4% dari 4.073 jumlah keseluruhan sekolah di daerah terluar. Dengan kondisi perpustakaan baik (32,6%), rusak ringan (55,6%), rusak sedang (5,2%), rusak berat (3,5%), dan rusak total (3,2%). Sementara untuk tingkat SMP, baru terdapat 950 sekolah atau sebesar 76,5% yang memiliki Perpustakaan dari 1.242 jumlah keseluruhan SMP. Dengan kondisi perpustakaan baik (30,1%), rusak ringan (51,3%), rusak sedang (8%), rusak berat (6,1%), dan rusak total (4,5%). Tabel berikut menggambarkan ketersediaan Perpustakaan di masing-masing kabupaten daerah terluar tahun 2017.

Tabel 4.18. Ketersediaan Perpustakaan Tingkat SD, Daerah Terluar 2017

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Aceh	Kab. Aceh Besar	210	193	19%	69%	7%	4%	2%
Aceh	Kota Sabang	25	23	48%	48%	0%	4%	0%
Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	467	352	40%	53%	2%	3%	1%
Riau	Kab. Bengkalis	339	236	32%	56%	6%	3%	3%
Riau	Kab. Indragiri Hilir	519	271	33%	55%	7%	3%	3%
Riau	Kab. Pelalawan	225	171	42%	52%	3%	2%	1%
Riau	Kab. Rokan Hilir	364	139	21%	58%	9%	7%	5%
Riau	Kab. Kepulauan Meranti	174	116	17%	59%	12%	8%	4%
Riau	Kota Dumai	105	96	36%	51%	2%	3%	7%
Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	476	307	27%	60%	8%	2%	3%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Kalimantan Timur	Kab. Berau	163	79	43%	52%	3%	3%	0%
Sulawesi Utara	Kab. Kep. Sangihe	209	192	36%	52%	3%	3%	6%
Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	116	95	25%	55%	7%	3%	9%
Papua	Kota Jayapura	89	75	35%	59%	1%	0%	5%
Kepulauan Riau	Kab. Bintan	97	70	20%	59%	1%	17%	3%
Kepulauan Riau	Kab. Karimun	136	90	38%	51%	4%	4%	2%
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	80	83	35%	53%	10%	1%	1%
Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	25	20	45%	50%	0%	5%	0%
Kepulauan Riau	Kota Batam	148	114	53%	44%	1%	1%	2%
Kalimantan Utara	Kab. Malinau	106	64	25%	61%	3%	6%	5%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Tabel 4.19. Ketersediaan Perpustakaan SMP, Daerah Terluar 2017

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Aceh	Kab. Aceh Besar	72	66	23%	55%	12%	9%	2%
Aceh	Kota Sabang	9	9	33%	67%	0%	0%	0%
Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	87	75	32%	51%	11%	5%	1%
Riau	Kab. Bengkalis	98	81	23%	62%	6%	6%	2%
Riau	Kab. Indragiri Hilir	135	75	23%	45%	9%	12%	11%
Riau	Kab. Pelalawan	66	50	48%	44%	8%	0%	0%
Riau	Kab. Rokan Hilir	122	80	18%	56%	10%	4%	13%
Riau	Kab. Kepulauan Meranti	47	28	21%	36%	11%	14%	18%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Riau	Kota Dumai	35	28	18%	71%	7%	0%	4%
Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	90	79	25%	51%	11%	6%	6%
Kalimantan Timur	Kab. Berau	49	39	44%	51%	5%	0%	0%
Sulawesi Utara	Kab. Kep. Sangihe	54	45	22%	53%	9%	9%	7%
Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	47	43	21%	44%	7%	16%	12%
Papua	Kota Jayapura	21	15	20%	67%	7%	7%	0%
Kepulauan Riau	Kab. Bintan	32	30	27%	40%	13%	20%	0%
Kepulauan Riau	Kab. Karimun	50	31	39%	48%	10%	3%	0%
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	21	20	25%	60%	15%	0%	0%
Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	25	20	45%	50%	0%	5%	0%
Kepulauan Riau	Kota Batam	148	114	53%	44%	1%	1%	2%
Kalimantan Utara	Kab. Malinau	34	22	27%	64%	5%	5%	0%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Kurangnya perpustakaan pada tingkat SD maupun SMP di daerah terluar ini harus ditanggulangi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pentingnya tempat penyimpanan dan tempat membaca buku bagi anak-anak di daerah terluar, dengan menyediakan buku-buku bacaan yang menarik tentang sejarah Indonesia dan bacaan-bacaan tentang Indonesia, akan meningkatkan rasa kecintaan pada bangsa Indonesia. Di khawatirkan, dengan dekatnya daerah tersebut dari negara-negara lain, arus masuk buku-buku bacaan dengan paham lain serta

budaya lain, akan mempengaruhi karakter dan rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia.

c. Ketersediaan Perpustakaan Daerah Tertinggal

Pada daerah tertinggal, hanya terdapat 52,9% atau sebanyak 11.188 SD yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan sebanyak 21.140 sekolah. Dari jumlah 11.188 SD yang memiliki perpustakaan, dalam kondisi baik (26,5%), rusak ringan (55,7%), rusak sedang (7,1%), rusak berat (5,7%), dan rusak total (5%). Sementara untuk tingkat SMP, baru terdapat 58,72% atau sebanyak 3.596 sekolah yang memiliki Perpustakaan dari jumlah keseluruhan sebanyak 6.124 SMP. Dari jumlah 11.188 SD yang memiliki perpustakaan, dalam kondisi baik (25,2%), rusak ringan (49,1%), rusak sedang (9%), rusak berat (8,5%), dan rusak total (8,2%). Tabel berikut menggambarkan ketersediaan Perpustakaan di masing-masing kabupaten yang berada di daerah tertinggal tahun 2017.

Tabel 4.20. Ketersediaan Perpustakaan SD, Daerah Tertinggal 2017

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Jawa Timur	Kab. Bondowoso	512	277	26%	56%	5%	7%	5%
Jawa Timur	Kab. Situbondo	444	282	32%	60%	4%	2%	2%
Jawa Timur	Kab. Sampang	624	407	27%	62%	6%	3%	2%
Jawa Timur	Kab. Bangkalan	704	371	16%	64%	8%	6%	6%
Aceh	Kab. Aceh Singkil	108	102	18%	57%	8%	10%	8%
Sumatera Utara	Kab. Nias	160	11	18%	27%	36%	9%	9%
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	354	10	20%	50%	10%	20%	0%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	103	26	12%	58%	19%	8%	4%
Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	165	11	0%	73%	18%	0%	9%
Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	117	9	33%	22%	11%	22%	11%
Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	149	1	100 %	0%	0%	0%	0%
Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	264	9	22%	78%	0%	0%	0%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	312	5	60%	40%	0%	0%	0%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	125	10	20%	70%	0%	10%	0%
Lampung	Kab. Lampung Barat	211	137	23%	58%	10%	7%	1%
Lampung	Kab. Pesisir Barat	120	74	16%	62%	12%	5%	4%
Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	523	51	39%	47%	8%	4%	2%
Kalimantan Barat	Kab. Landak	456	258	18%	67%	7%	6%	2%
Kalimantan Barat	Kab. Melawi	255	128	16%	50%	15%	11%	9%
Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	104	97	27%	68%	2%	3%	0%
Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	165	131	41%	52%	2%	1%	4%
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	184	158	43%	53%	1%	1%	2%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	162	92	22%	48%	12%	10%	9%
Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	354	283	29%	57%	6%	3%	6%
Sulawesi Tengah	Kab. Buol	169	121	17%	66%	7%	5%	4%
Sulawesi Tengah	Kab. ToliToli	227	117	34%	53%	3%	3%	7%
Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	423	196	38%	47%	3%	5%	7%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	183	165	38%	46%	5%	5%	5%
Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	267	148	57%	37%	3%	1%	2%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	81	42	26%	45%	5%	14%	10%
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	150	73	37%	45%	8%	8%	1%
Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	292	205	20%	53%	8%	8%	11%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	278	175	22%	54%	10%	7%	7%
Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	168	104	13%	56%	13%	13%	7%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	49	32	22%	63%	3%	9%	3%
Maluku	Kab. Maluku Tengah	390	181	39%	47%	8%	4%	2%
Maluku	Kab. Buru	143	120	14%	60%	13%	5%	8%
Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	203	131	26%	50%	10%	6%	8%
Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	146	74	41%	46%	4%	7%	3%
Maluku	Kab. Buru Selatan	97	41	24%	46%	5%	17%	7%
NTB	Kab. Lombok Barat	359	295	25%	67%	4%	1%	2%
NTB	Kab. Lombok Tengah	601	471	29%	59%	5%	4%	3%
NTB	Kab. Lombok Timur	734	416	37%	56%	2%	3%	2%
NTB	Kab. Sumbawa	371	271	35%	55%	5%	3%	2%
NTB	Kab. Dompu	221	170	16%	55%	7%	11%	11%
NTB	Kab. Bima	424	266	14%	54%	13%	8%	12%
NTB	Kab. Sumbawa Barat	99	92	25%	64%	3%	4%	3%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
NTB	Kab. Lombok Utara	152	123	47%	46%	3%	1%	2%
NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	500	219	21%	55%	9%	12%	3%
NTT	Kab. Ende	333	165	27%	54%	7%	6%	7%
NTT	Kab. Manggarai	238	210	39%	50%	4%	3%	5%
NTT	Kab. Sumba Timur	257	143	22%	66%	7%	3%	2%
NTT	Kab. Sumba Barat	91	89	9%	45%	11%	18%	17%
NTT	Kab. Lembata	158	124	10%	51%	13%	10%	15%
NTT	Kab. Manggarai Barat	259	147	21%	49%	10%	14%	7%
NTT	Kab. Nagakeo	178	133	26%	57%	5%	6%	7%
NTT	Kab. Sumba Tengah	81	75	15%	67%	7%	11%	1%
NTT	Kab. Sumba Barat Daya	248	151	15%	52%	11%	12%	10%
NTT	Kab. Manggarai Timur	330	282	26%	56%	7%	6%	5%
Papua	Kab. Biak Numfor	167	71	39%	48%	6%	6%	1%
Papua	Kab. Kepulauan Yapen	122	21	19%	71%	0%	10%	0%
Papua	Kab. Jaya wijaya	116	54	17%	69%	7%	6%	2%
Papua	Kab. Nabire	120	28	25%	57%	4%	7%	7%
Papua	Kab. Paniai	83	21	52%	29%	10%	5%	5%
Papua	Kab. Puncak Jaya	23	2	50%	50%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Mappi	149	10	10%	40%	30%	0%	20%
Papua	Kab. Asmat	131	16	25%	69%	6%	0%	0%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Papua	Kab. Yahukimo	147	20	10%	70%	0%	10%	10%
Papua	Kab. Tolikara	70	4	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Sarmi	64	14	21%	71%	7%	0%	0%
Papua	Kab. Waropen	49	9	0%	0%	22%	11%	67%
Papua	Kab. Memberamo Raya	73	4	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Nduga	22	4	0%	75%	25%	0%	0%
Papua	Kab. Lanny Jaya	68	2	50%	0%	50%	0%	0%
Papua	Kab. Membramo Tengah	34	4	75%	0%	25%	0%	0%
Papua	Kab. Yalimo	50	20	10%	75%	10%	0%	5%
Papua	kab. Puncak	29	8	13%	75%	0%	13%	0%
Papua	Kab. Dogiyai	63	7	0%	86%	0%	0%	14%
Papua	Kab. Deiyai	55	23	0%	91%	9%	0%	0%
Papua	Kab. Intan Jaya	32	14	21%	64%	7%	0%	7%
Bengkulu	Kab. Seluma	182	6	0%	83%	0%	17%	0%
Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	83	18	17%	39%	17%	11%	17%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	174	119	19%	57%	9%	5%	9%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	286	95	17%	56%	9%	12%	6%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	97	80	13%	54%	21%	6%	6%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	101	46	33%	37%	15%	2%	13%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Banten	Kab. Pandeglang	877	531	22%	61%	6%	5%	6%
Banten	Kab. Lebak	802	374	34%	51%	7%	4%	4%
Gorontalo	Kab. Boalemo	136	130	23%	53%	16%	7%	1%
Gorontalo	Kab. Puhuwato	128	125	39%	60%	1%	0%	0%
Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	136	122	39%	50%	3%	6%	2%
Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	52	25	16%	72%	8%	4%	0%
Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	75	35	14%	66%	9%	3%	9%
Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	83	46	35%	41%	7%	7%	11%
Papua Barat	Kab. Sorong	126	51	12%	71%	8%	4%	6%
Papua Barat	Kab. Tambrauw	49	9	56%	33%	11%	0%	0%
Papua Barat	Kab. Maybrat	58	27	7%	37%	30%	22%	4%
Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	334	206	35%	49%	6%	7%	3%
Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	119	80	18%	56%	15%	8%	4%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Tabel 4.21. Ketersediaan Perpustakaan SMP, Daerah Tertinggal 2017

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Jawa Timur	Kab. Bondowoso	101	67	18%	66%	7%	6%	3%
Jawa Timur	Kab. Situbondo	92	65	28%	57%	11%	5%	0%
Jawa Timur	Kab. Sampang	262	87	11%	64%	14%	6%	5%
Jawa Timur	Kab. Bangkalan	219	93	27%	54%	9%	5%	5%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Aceh	Kab. Aceh Singkil	37	25	16%	44%	12%	16%	12%
Sumatera Utara	Kab. Nias	49	1	0%	100%	0%	0%	0%
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	131	11	18%	18%	9%	27%	27%
Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	54	10	10%	80%	10%	0%	0%
Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	38	5	20%	40%	0%	20%	20%
Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	26	4	50%	25%	0%	0%	25%
Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	38	2	50%	50%	0%	0%	0%
Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	63	7	29%	57%	0%	14%	0%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	59	3	0%	67%	0%	33%	0%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	28	2	50%	0%	0%	0%	50%
Lampung	Kab. Lampung Barat	54	43	21%	51%	7%	16%	5%
Lampung	Kab. Pesisir Barat	36	32	16%	44%	25%	13%	3%
Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	141	87	21%	56%	7%	5%	11%
Kalimantan Barat	Kab. Landak	81	68	28%	53%	4%	10%	4%
Kalimantan Barat	Kab. Melawi	98	54	22%	44%	15%	11%	7%
Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	51	30	27%	47%	23%	3%	0%
Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	71	47	21%	62%	9%	6%	2%
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	43	40	40%	53%	5%	3%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	57	41	22%	63%	7%	7%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	94	60	28%	48%	5%	10%	8%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Sulawesi Tengah	Kab. Buol	66	37	24%	27%	3%	27%	19%
Sulawesi Tengah	Kab. ToliToli	66	46	24%	41%	20%	13%	2%
Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	91	66	21%	52%	11%	11%	6%
Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	60	37	19%	49%	11%	11%	11%
Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	62	38	34%	39%	3%	13%	11%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	38	17	41%	24%	0%	12%	24%
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	46	25	32%	36%	4%	16%	12%
Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	69	60	22%	43%	7%	12%	17%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	72	69	14%	46%	12%	13%	14%
Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	50	39	23%	44%	10%	13%	10%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	30	15	27%	33%	7%	13%	20%
Maluku	Kab. Maluku Tengah	126	91	23%	51%	10%	7%	10%
Maluku	Kab. Buru	72	58	28%	40%	21%	3%	9%
Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	76	38	26%	39%	8%	13%	13%
Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	64	35	23%	46%	6%	9%	17%
Maluku	Kab. Buru Selatan	45	19	16%	58%	16%	5%	5%
NTB	Kab. Lombok Barat	87	62	29%	52%	16%	2%	2%
NTB	Kab. Lombok Tengah	118	89	22%	51%	7%	9%	11%
NTB	Kab. Lombok Timur	183	107	39%	42%	5%	9%	5%
NTB	Kab. Sumbawa	208	101	23%	50%	10%	7%	10%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
NTB	Kab. Dompu	60	45	20%	40%	11%	18%	11%
NTB	Kab. Bima	121	105	23%	46%	15%	10%	6%
NTB	Kab. Sumbawa Barat	48	37	27%	57%	3%	11%	3%
NTB	Kab. Lombok Utara	38	26	35%	62%	0%	0%	4%
NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	126	90	17%	59%	3%	8%	13%
NTT	Kab. Ende	69	59	22%	42%	14%	12%	10%
NTT	Kab. Manggarai	87	80	40%	38%	6%	6%	10%
NTT	Kab. Sumba Timur	71	51	14%	73%	6%	4%	4%
NTT	Kab. Sumba Barat	37	33	15%	58%	12%	6%	9%
NTT	Kab. Lembata	48	35	6%	40%	6%	11%	37%
NTT	Kab. Manggarai Barat	74	29	38%	41%	10%	3%	7%
NTT	Kab. Nagakeo	82	49	24%	49%	4%	10%	12%
NTT	Kab. Sumba Tengah	45	31	42%	32%	3%	16%	6%
NTT	Kab. Sumba Barat Daya	59	36	31%	28%	8%	6%	28%
NTT	Kab. Manggarai Timur	138	57	26%	51%	14%	4%	5%
Papua	Kab. Biak Numfor	49	34	15%	59%	6%	6%	15%
Papua	Kab. Kepulauan Yapen	38	23	0%	70%	9%	13%	9%
Papua	Kab. Jaya wijaya	28	22	23%	64%	9%	0%	5%
Papua	Kab. Nabire	46	32	28%	53%	16%	0%	3%
Papua	Kab. Paniai	20	13	0%	54%	15%	15%	15%
Papua	Kab. Puncak Jaya	13	4	50%	50%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Mappi	16	7	29%	43%	0%	0%	29%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Papua	Kab. Asmat	19	7	29%	43%	14%	14%	0%
Papua	Kab. Yahukimo	32	7	0%	86%	14%	0%	0%
Papua	Kab. Tolikara	19	6	17%	83%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Sarmi	16	10	10%	60%	0%	10%	20%
Papua	Kab. Waropen	14	10	50%	20%	0%	0%	30%
Papua	Kab. Memberamo Raya	13	3	0%	33%	33%	33%	0%
Papua	Kab. Nduga	10	5	40%	20%	20%	20%	0%
Papua	Kab. Lanny Jaya	23	5	20%	20%	0%	60%	0%
Papua	Kab. Membramo Tengah	9	4	75%	0%	25%	0%	0%
Papua	Kab. Yalimo	18	9	11%	78%	0%	0%	11%
Papua	kab. Puncak	9	3	33%	33%	33%	0%	0%
Papua	Kab. Dogiyai	9	5	0%	60%	20%	0%	20%
Papua	Kab. Deiyai	6	6	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Intan Jaya	9	6	0%	83%	0%	17%	0%
Bengkulu	Kab. Seluma	47	1	0%	100%	0%	0%	0%
Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	37	9	44%	11%	22%	11%	11%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	46	28	25%	54%	4%	7%	11%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	77	51	6%	47%	16%	25%	6%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	75	35	34%	37%	14%	14%	0%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	71	42	24%	43%	7%	12%	14%
Banten	Kab. Pandeglang	114	91	33%	49%	4%	5%	8%
Banten	Kab. Lebak	203	132	42%	38%	8%	5%	6%
Gorontalo	Kab. Boalemo	54	43	33%	49%	12%	5%	2%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Brat	Rusak Total
Gorontalo	Kab. Pohuwato	41	39	26%	67%	0%	3%	5%
Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	45	34	47%	41%	9%	0%	3%
Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	12	6	0%	100%	0%	0%	0%
Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	28	17	47%	35%	6%	6%	6%
Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	21	16	25%	44%	19%	13%	0%
Papua Barat	Kab. Sorong	38	26	35%	42%	8%	8%	8%
Papua Barat	Kab. Tambrauw	15	8	13%	63%	0%	0%	25%
Papua Barat	Kab. Maybrat	14	7	0%	86%	0%	14%	0%
Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	81	63	25%	56%	10%	5%	5%
Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	34	31	29%	48%	6%	3%	13%

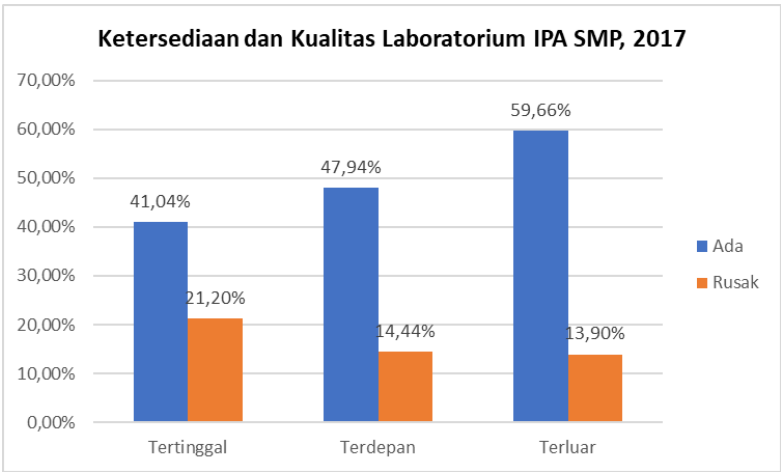
Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

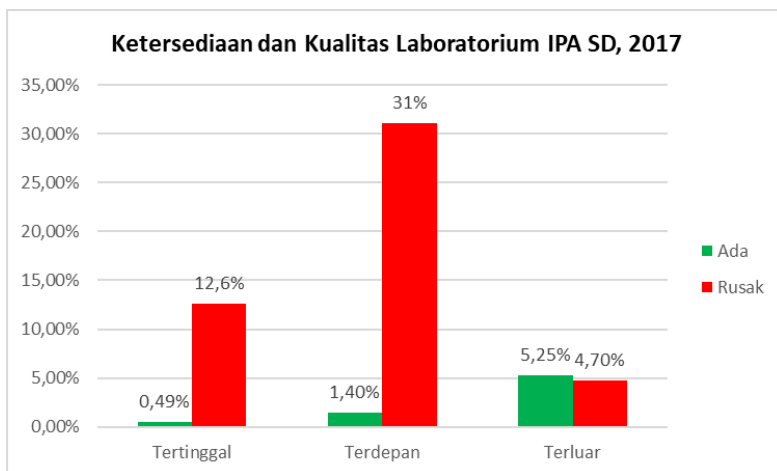
Masih minimnya perpustakaan pada tingkat SD maupun SMP di daerah 3T ini menggambarkan perbandingan yang terbalik dengan gerakan literasi yang dicanangkan oleh Pemerintah. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan nama resmi gerakan yang digulirkan pemerintah melalui Kemdikbud, dan berada dalam koordinasi Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Desain Induk GLS dijelaskan bahwa GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain-lain), dan pemangku kepentingan di bawah

koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Desain Induk GLS, 2016: 7). Salah satu faktor kunci keberhasilan gerakan literasi adalah ketersediaannya Perpustakaan di sekolah.

6. Ketersediaan Laboratorium IPA

Rasio ini digunakan untuk membandingkan antara jumlah Laboratorium IPA di daerah 3T dengan jumlah sekolah yang ada, dan dinyatakan dalam persentase. Intinya rasio ini digunakan untuk mengetahui sekolah yang belum memiliki laboratorium IPA dan kondisi laboratorium tersebut.





Grafik 4.13. Ketersediaan dan Kualitas Laboratorium IPA Daerah 3T

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

a. Ketersediaan Laboratorium IPA di Daerah Terdepan

Ketersediaan Laboratorium IPA di daerah terdepan pada tingkat SD hanya 1,4% atau 58 lab dari total SD di daerah terdepan sebanyak 4,187 SD, dengan kondisi baik (26%), rusak ringan (29%), rusak sedang (14%), rusak berat (16%), dan rusak berat (16%). Sementara di tingkat SMP, yang menyediakan laboratorium IPA sebanyak 47,94% atau sebanyak 651 lab dari total sekolah di daerah terdepan sebanyak 1.358 SMP dengan kondisi laboratorium IPA baik (26,7%), rusak ringan (51,6%), rusak sedang (7,2%), rusak berat (6%), dan rusak total (8,4%). Hal ini cukup menyedihkan ketersediaan prasarana laboratorium IPA untuk siswa dapat belajar sains masih sangat minim. Berikut tabel yang menampilkan kuantitas dan kualitas laboratorium di setiap kabupaten di daerah terdepan.

Tabel 4.22. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SD daerah terdepan, 2017

Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Lab IPA	Laboratorium IPA Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Ring	Rusak Seda	Rusak Bera	Rusak Tota
Kalimantan Barat	Kab. Sambas	366	3	67%	33%	0%	0%	0%
Kalimantan Barat	Kab. Sintang	430	1	100%	0%	0%	0%	0%
Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	409	2	50%	50%	0%	0%	0%
Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	274	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	39	30	20%	20%	20%	20%	20%
Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	120	2	50%	0%	0%	0%	50%
Maluku	Kab. Kepulauan Aru	140	-	-	-	-	-	-
Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	153	2	0%	50%	0%	50%	0%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	358	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	263	3	0%	67%	33%	0%	0%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	145	4	25%	50%	0%	0%	25%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	275	4	25%	0%	25%	25%	25%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	143	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	77	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	207	1	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Merauke	198	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Boven Digoel	98	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Pegunungan Bintang	60	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Keerom	72	4	50%	25%	0%	25%	0%
Papua	Kab. Supiori	40	1	0%	100%	0%	0%	0%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Morotai	82	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	Kab. Raja Ampat	106	1	0%	100%	0%	0%	0%
Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	132	-	-	-	-	-	-

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Tabel 4.23. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP daerah terdepan, 2017

Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Lab IPA	Laboratorium IPA Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Ring	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total
Kalimantan Barat	Kab. Sambas	136	99	26%	59%	7%	4%	4%
Kalimantan Barat	Kab. Sintang	133	67	33%	42%	13%	4%	7%
Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	109	53	21%	62%	2%	6%	9%
Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	90	49	22%	47%	8%	10%	12%
Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu	17	7	29%	57%	0%	0%	14%
Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	50	24	21%	58%	0%	17%	4%
Maluku	Kab. Kepulauan Aru	33	7	29%	57%	0%	0%	14%
Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	51	10	10%	40%	10%	10%	30%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	139	52	31%	52%	6%	6%	6%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	122	41	22%	51%	15%	5%	7%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	48	26	38%	46%	12%	4%	0%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	107	36	22%	33%	14%	11%	19%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao	47	34	21%	44%	12%	6%	18%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	36	17	47%	35%	0%	12%	6%
Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	38	12	25%	58%	0%	0%	17%
Papua	Kab. Merauke	43	35	23%	63%	3%	3%	9%
Papua	Kab. Boven Digoel	11	3	33%	67%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Pegunungan Bintang	20	4	25%	75%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Keerom	15	12	33%	58%	0%	0%	8%
Papua	Kab. Supiori	12	5	20%	60%	0%	20%	0%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Morotai	22	11	27%	73%	0%	0%	0%
Papua Barat	Kab. Raja Ampat	39	25	28%	44%	8%	8%	12%
Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	40	22	36%	55%	5%	5%	0%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

b. Ketersediaan Laboratorium IPA di Daerah Terluar

Ketersediaan Laboratorium IPA di daerah terluar pada tingkat SD hanya 5,25% atau 214 lab dari total SD di daerah terluar sebanyak 4,073 SD, dengan kondisi baik (48%), rusak ringan (44%), rusak sedang (4%), rusak berat (1%), dan rusak berat (1%). Sementara di tingkat SMP, yang menyediakan laboratorium IPA sebanyak 59,66% atau sebanyak 741 lab dari total sekolah di daerah terluar sebanyak 1.242 SMP dengan kondisi laboratorium IPA baik (28%), rusak ringan (49%), rusak sedang (8%), rusak berat (8%), dan rusak total (6%). Hal ini cukup menyedihkan ketersediaan prasarana laboratorium untuk siswa dapat belajar sains masih sangat minim. Berikut tabel yang menampilkan kuantitas dan kualitas laboratorium di setiap kabupaten di daerah terluar.

Tabel 4.24. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SD Daerah Terluar, 2017

Nama Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Lab IPA	Laboratorium IPA Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Ring	Rusak Seda	Rusak Berat	Rusak Total
Aceh	Kab. Aceh Besar	210	7	29%	71%	0%	0%	0%
Aceh	Kota Sabang	25	2	100%	0%	0%	0%	0%
Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	467	1	100%	0%	0%	0%	0%
Riau	Kab. Bengkalis	339	18	39%	56%	6%	0%	0%
Riau	Kab. Indragiri Hilir	519	16	44%	44%	6%	0%	6%
Riau	Kab. Pelalawan	225	19	68%	26%	5%	0%	0%
Riau	Kab. Rokan Hilir	364	11	36%	55%	0%	0%	9%
Riau	Kab. Kepulauan Meranti	174	5	20%	40%	0%	40%	0%
Riau	Kota Dumai	105	20	50%	45%	5%	0%	0%
Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	476	2	0%	50%	0%	50%	0%
Kalimantan Timur	Kab. Berau	163	4	25%	75%	0%	0%	0%
Sulawesi Utara	Kab. Kep. Sangihe	209	2	50%	0%	0%	50%	0%
Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	116	1	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kota Jayapura	89	5	40%	60%	0%	0%	0%
Kepulauan Riau	Kab. Bintan	97	1	100%	0%	0%	0%	0%
Kepulauan Riau	Kab. Karimun	136	1	100%	0%	0%	0%	0%
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	80	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	25	11	55%	27%	9%	9%	0%
Kepulauan Riau	Kota Batam	148	88	50%	45%	1%	2%	1%
Kalimantan Utara	Kab. Malinau	106	-	-	-	-	-	-

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

Tabel 4.25. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP daerah terluar, 2017

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Aceh	Kab. Aceh Besar	72	56	16%	52%	18%	11%	4%
Aceh	Kota Sabang	9	8	50%	50%	0%	0%	0%
Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	87	55	33%	51%	7%	4%	5%
Riau	Kab. Bengkalis	98	61	20%	64%	7%	8%	2%
Riau	Kab. Indragiri Hilir	135	59	19%	44%	14%	10%	14%
Riau	Kab. Pelalawan	66	39	41%	49%	5%	5%	0%
Riau	Kab. Rokan Hilir	122	54	22%	63%	7%	2%	6%
Riau	Kab. Kepulauan Meranti	47	27	15%	44%	11%	11%	19%
Riau	Kota Dumai	35	22	23%	50%	23%	0%	5%
Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	90	57	18%	54%	7%	16%	5%
Kalimantan Timur	Kab. Berau	49	32	28%	63%	3%	3%	3%
Sulawesi Utara	Kab. Kep. Sangihe	54	38	29%	37%	5%	16%	13%
Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	47	35	20%	31%	3%	29%	17%
Papua	Kota Jayapura	21	14	36%	57%	0%	0%	7%
Kepulauan Riau	Kab. Bintan	32	26	23%	35%	23%	15%	4%
Kepulauan Riau	Kab. Karimun	50	31	39%	52%	10%	0%	0%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Kepulauan Riau	Kab. Natuna	21	16	25%	56%	6%	6%	6%
Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	25	11	55%	27%	9%	9%	0%
Kepulauan Riau	Kota Batam	148	88	50%	45%	1%	2%	1%
Kalimantan Utara	Kab. Malinau	34	12	50%	25%	8%	8%	8%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

c. Ketersediaan Laboratorium IPA di Daerah Tertinggal

Ketersediaan Laboratorium IPA di daerah tertinggal pada tingkat SD hanya 0,49% atau 103 lab dari total SD di daerah tertinggal sebanyak 21.140 SD, dengan kondisi baik (20,4%), rusak ringan (54,4%), rusak sedang (12,6%), rusak berat (5,8%), dan rusak berat (6,8%). Sementara di tingkat SMP, yang menyediakan laboratorium IPA sebanyak 41,04% atau sebanyak 2.513 lab dari total sekolah di daerah tertinggal sebanyak 6.124 SMP dengan kondisi laboratorium IPA baik (26,6%), rusak ringan (44%), rusak sedang (8,1%), rusak berat (10,2%), dan rusak total (11,1%). Hal ini cukup menyedihkan ketersediaan prasarana laboratorium untuk siswa dapat belajar sains masih sangat minim. Berikut tabel yang menampilkan kuantitas dan kualitas laboratorium di setiap kabupaten di daerah tertinggal.

Tabel 4.26. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP Daerah Tertinggal, 2017

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Jawa Timur	Kab. Bondowoso	512	6	33%	50%	0%	0%	17%
Jawa Timur	Kab. Situbondo	444	4	25%	75%	0%	0%	0%
Jawa Timur	Kab. Sampang	624	1	0%	100%	0%	0%	0%
Jawa Timur	Kab. Bangkalan	704	5	20%	60%	0%	20%	0%
Aceh	Kab. Aceh Singkil	108	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	Kab. Nias	160	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	354	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	103	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	165	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	117	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	149	-	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	264	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	312	1	0%	0%	0%	100%	0%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	125	-	-	-	-	-	-
Lampung	Kab. Lampung Barat	211	-	-	-	-	-	-
Lampung	Kab. Pesisir Barat	120	-	-	-	-	-	-

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	523	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	Kab. Landak	456	2	100 %	0%	0%	0%	0%
Kalimantan Barat	Kab. Melawi	255	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	104	1	0%	100%	0%	0%	0%
Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	165	5	40%	60%	0%	0%	0%
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	184	3	33%	67%	0%	0%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	162	1	0%	100%	0%	0%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	354	2	100 %	0%	0%	0%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Buol	169	1	0%	100%	0%	0%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. ToliToli	227	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	423	1	0%	0%	0%	0%	100%
Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	183	2	0%	100%	0%	0%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	267	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	81	1	100 %	0%	0%	0%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	150	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	292	1	0%	100%	0%	0%	0%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	278	5	20%	60%	20%	0%	0%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	168	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	49	-	-	-	-	-	-
Maluku	Kab. Maluku Tengah	390	-	-	-	-	-	-
Maluku	Kab. Buru	143	1	0%	100%	0%	0%	0%
Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	203	1	100 %	0%	0%	0%	0%
Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	146	1	0%	0%	100%	0%	0%
Maluku	Kab. Buru Selatan	97	1	0%	100%	0%	0%	0%
NTB	Kab. Lombok Barat	359	3	0%	100%	0%	0%	0%
NTB	Kab. Lombok Tengah	601	4	0%	75%	0%	0%	25%
NTB	Kab. Lombok Timur	734	1	0%	100%	0%	0%	0%
NTB	Kab. Sumbawa	371	2	0%	0%	50%	50%	0%
NTB	Kab. Dompu	221	2	0%	0%	0%	0%	100%
NTB	Kab. Bima	424	3	0%	67%	0%	0%	33%
NTB	Kab. Sumbawa Barat	99	1	0%	100%	0%	0%	0%
NTB	Kab. Lombok Utara	152	-	-	-	-	-	-

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	500	3	0%	100%	0%	0%	0%
NTT	Kab. Ende	333	4	0%	75%	25%	0%	0%
NTT	Kab. Manggarai	238	-	-	-	-	-	-
NTT	Kab. Sumba Timur	257	-	-	-	-	-	-
NTT	Kab. Sumba Barat	91	1	0%	0%	0%	100%	0%
NTT	Kab. Lembata	158	4	25%	25%	50%	0%	0%
NTT	Kab. Manggarai Barat	259	-	-	-	-	-	-
NTT	Kab. Nagakeo	178	4	25%	50%	25%	0%	0%
NTT	Kab. Sumba Tengah	81	-	-	-	-	-	-
NTT	Kab. Sumba Barat Daya	248	-	-	-	-	-	-
NTT	Kab. Manggarai Timur	330	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Biak Numfor	167	3	0%	67%	33%	0%	0%
Papua	Kab. Kepulauan Yapen	122	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Jayawijaya	116	1	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Nabire	120	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Paniai	83	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Puncak Jaya	23	-	-	-	-	-	-

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Papua	Kab. Mappi	149	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Asmat	131	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Yahukimo	147	1	0%	0%	0%	100%	0%
Papua	Kab. Tolikara	70	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Sarmi	64	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Waropen	49	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Memberamo Raya	73	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Nduga	22	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Lanny Jaya	68	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Membramo Tengah	34	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Yalimo	50	1	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	kab. Puncak	29	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Dogiyai	63	1	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Deiyai	55	-	-	-	-	-	-
Papua	Kab. Intan Jaya	32	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	Kab. Seluma	182	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	83	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	174	-	-	-	-	-	-

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	286	4	25%	50%	0%	25%	0%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	97	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	101	-	-	-	-	-	-
Banten	Kab. Pandeglang	877	3	67%	33%	0%	0%	0%
Banten	Kab. Lebak	802	2	50%	50%	0%	0%	0%
Gorontalo	Kab. Boalemo	136	2	0%	0%	100%	0%	0%
Gorontalo	Kab. Pohuwato	128	1	100 %	0%	0%	0%	0%
Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	136	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	52	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	75	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	83	1	0%	0%	100%	0%	0%
Papua Barat	Kab. Sorong	126	5	0%	40%	40%	0%	20%
Papua Barat	Kab. Tambrauw	49	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	Kab. Maybrat	58	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	334	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	119	-	-	-	-	-	-

Sumber: PDSPK, Kemdikbud. 2017.

Tabel 4.27. Ketersediaan dan Kondisi Laboratorium IPA Tingkat SMP daerah tertinggal, 2017

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Jawa Timur	Kab. Bondowoso	101	58	21%	60%	3%	5%	10%
Jawa Timur	Kab. Situbondo	92	58	26%	52%	14%	7%	2%
Jawa Timur	Kab. Sampang	262	56	23%	52%	4%	16%	5%
Jawa Timur	Kab. Bangkalan	219	67	30%	48%	3%	6%	13%
Aceh	Kab. Aceh Singkil	37	20	15%	40%	20%	15%	10%
Sumatera Utara	Kab. Nias	49	0	0%	0%	0%	0%	0%
Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	131	6	17%	17%	17%	33%	17%
Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	54	4	0%	75%	25%	0%	0%
Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	38	3	33%	33%	0%	33%	0%
Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	26	2	50%	0%	0%	0%	50%
Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	38	1	0%	100%	0%	0%	0%
Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	63	5	40%	40%	0%	20%	0%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	59	1	0%	100%	0%	0%	0%
Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	28	1	0%	100%	0%	0%	0%
Lampung	Kab. Lampung Barat	54	38	26%	42%	5%	13%	13%
Lampung	Kab. Pesisir Barat	36	24	17%	50%	8%	8%	17%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	141	54	13%	56%	9%	19%	4%
Kalimantan Barat	Kab. Landak	81	36	33%	44%	11%	8%	3%
Kalimantan Barat	Kab. Melawi	98	31	10%	61%	13%	10%	6%
Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	51	21	33%	52%	10%	5%	0%
Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	71	28	29%	64%	4%	0%	4%
Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	43	34	41%	47%	6%	6%	0%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	57	25	12%	60%	20%	4%	4%
Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	94	53	34%	42%	6%	2%	17%
Sulawesi Tengah	Kab. Buol	66	28	11%	32%	11%	25%	21%
Sulawesi Tengah	Kab. ToliToli	66	39	28%	54%	0%	8%	10%
Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	91	47	30%	36%	11%	11%	13%
Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	60	27	19%	44%	7%	7%	22%
Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	62	30	27%	23%	10%	30%	10%
Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	38	13	23%	15%	8%	15%	38%
Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	46	19	26%	42%	5%	11%	16%
Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	69	45	18%	49%	11%	7%	16%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	72	51	10%	49%	12%	12%	18%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	50	29	10%	52%	17%	14%	7%
Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	30	12	17%	50%	17%	8%	8%
Maluku	Kab. Maluku Tengah	126	66	21%	56%	3%	8%	12%
Maluku	Kab. Buru	72	32	6%	38%	28%	19%	9%
Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	76	29	28%	34%	7%	24%	7%
Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	64	24	21%	42%	4%	13%	21%
Maluku	Kab. Buru Selatan	45	9	11%	44%	11%	11%	22%
NTB	Kab. Lombok Barat	87	47	26%	60%	6%	4%	4%
NTB	Kab. Lombok Tengah	118	64	22%	38%	13%	14%	14%
NTB	Kab. Lombok Timur	183	77	31%	40%	4%	14%	10%
NTB	Kab. Sumbawa	208	68	31%	38%	4%	13%	13%
NTB	Kab. Dompu	60	32	19%	44%	6%	22%	9%
NTB	Kab. Bima	121	76	25%	38%	13%	13%	11%
NTB	Kab. Sumbawa Barat	48	29	34%	48%	7%	7%	3%
NTB	Kab. Lombok Utara	38	18	39%	39%	0%	11%	11%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	126	39	23%	44%	13%	15%	5%
NTT	Kab. Ende	69	41	24%	37%	7%	12%	20%
NTT	Kab. Manggarai	87	53	47%	28%	9%	8%	8%
NTT	Kab. Sumba Timur	71	31	26%	61%	6%	6%	0%
NTT	Kab. Sumba Barat	37	15	40%	27%	27%	7%	0%
NTT	Kab. Lembata	48	33	12%	21%	9%	9%	48%
NTT	Kab. Manggarai Barat	74	20	35%	40%	5%	0%	20%
NTT	Kab. Nagakeo	82	27	37%	37%	4%	4%	19%
NTT	Kab. Sumba Tengah	45	22	55%	32%	5%	5%	5%
NTT	Kab. Sumba Barat Daya	59	27	33%	22%	7%	7%	30%
NTT	Kab. Manggarai Timur	138	27	41%	22%	19%	11%	7%
Papua	Kab. Biak Numfor	49	18	28%	56%	6%	6%	6%
Papua	Kab. Kepulauan Yapen	38	12	17%	75%	0%	0%	8%
Papua	Kab. Jayawijaya	28	16	44%	44%	6%	0%	6%
Papua	Kab. Nabire	46	20	15%	70%	5%	5%	5%
Papua	Kab. Paniai	20	5	0%	80%	0%	0%	20%
Papua	Kab. Puncak Jaya	13	3	67%	33%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Mappi	16	3	0%	33%	0%	0%	67%

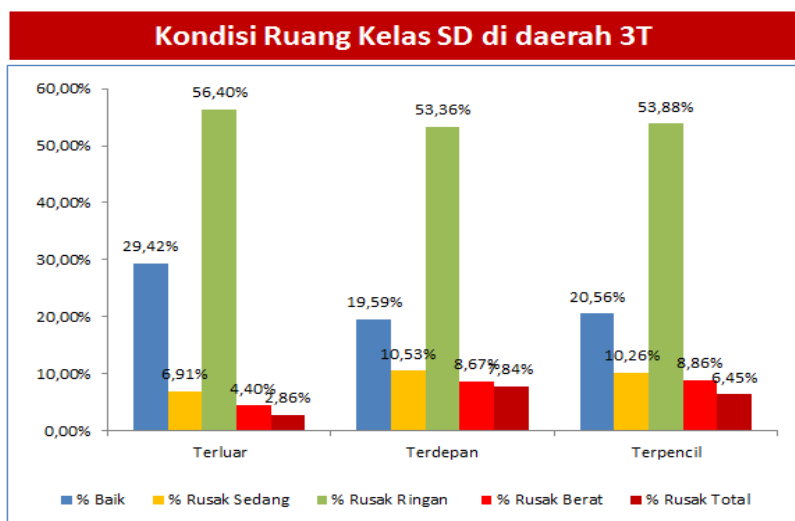
Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Papua	Kab. Asmat	19	7	43%	14%	14%	14%	14%
Papua	Kab. Yahukimo	32	0	0%	0%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Tolikara	19	3	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Sarmi	16	8	13%	25%	25%	0%	38%
Papua	Kab. Waropen	14	6	50%	17%	0%	0%	33%
Papua	Kab. Memberamo Raya	13	3	0%	33%	33%	0%	33%
Papua	Kab. Nduga	10	4	75%	0%	0%	0%	25%
Papua	Kab. Lanny Jaya	23	2	0%	0%	0%	50%	50%
Papua	Kab. Membramo Tengah	9	2	100%	0%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Yalimo	18	6	0%	83%	0%	0%	17%
Papua	kab. Puncak	9	1	100%	0%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Dogiyai	9	3	33%	33%	0%	0%	33%
Papua	Kab. Deiyai	6	2	0%	100%	0%	0%	0%
Papua	Kab. Intan Jaya	9	4	25%	50%	0%	25%	0%
Bengkulu	Kab. Seluma	47	1	0%	100%	0%	0%	0%
Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	37	7	14%	14%	14%	0%	57%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	46	16	25%	50%	13%	13%	0%
Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	77	31	6%	23%	10%	52%	10%

Nama Provinsi	Kab / Kota	Jml Sklh	Jml Perp us	Perpustakaan Menurut Kondisi				
				Baik	Rusak Rgan	Rusak Sdang	Rusak Berat	Rusak Total
Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	75	15	47%	33%	13%	0%	7%
Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	71	25	20%	36%	8%	12%	24%
Banten	Kab. Pandeglang	114	98	34%	43%	6%	9%	8%
Banten	Kab. Lebak	203	99	44%	31%	5%	9%	10%
Gorontalo	Kab. Boalemo	54	33	30%	42%	12%	12%	3%
Gorontalo	Kab. Pohuwato	41	37	35%	57%	0%	3%	5%
Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	45	21	48%	38%	5%	0%	10%
Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	12	5	0%	60%	20%	0%	20%
Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	28	14	36%	43%	0%	7%	14%
Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	21	9	22%	78%	0%	0%	0%
Papua Barat	Kab. Sorong	38	20	40%	35%	10%	0%	15%
Papua Barat	Kab. Tambrauw	15	5	20%	20%	0%	20%	40%
Papua Barat	Kab. Maybrat	14	6	17%	50%	17%	17%	0%
Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	81	49	22%	61%	6%	4%	6%
Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	34	22	14%	68%	14%	5%	0%

Sumber: PDSPK, Kemdikbud, 2017.

7. Kondisi Ruang Kelas

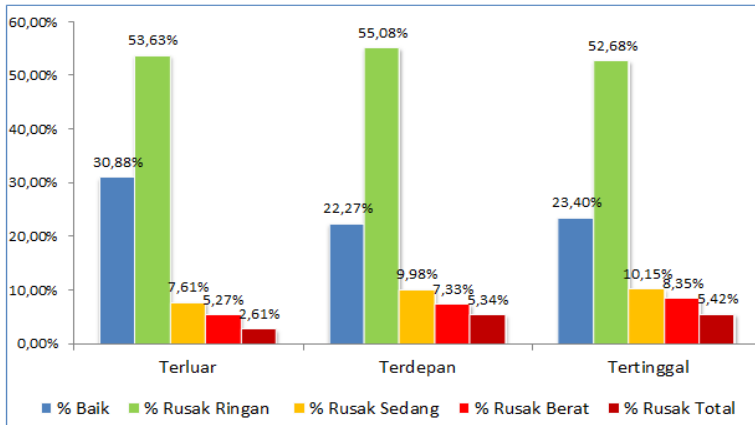
Kondisi gedung sekolah dan ruang kelas dapat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan, jika dilihat dari fungsi dan kegunaan gedung dan ruang kelas. Grafik berikut menunjukkan kondisi ruang yang ada di tiap daerah 3T, Terdepan, Terluar dan Tertinggal.



Grafik 18. Kondisi Ruang Kelas SD, Tahun 2017 di daerah 3T

Sumber: PDSPK. Kemdikbud. 2017.

Kondisi Ruang Kelas SMP di daerah 3T



Grafik 19. Kondisi Ruang Kelas SMP, Tahun 2017 di daerah 3T

Sumber: PDSPK. Kemdikbud. 2017.

Data di atas menunjukkan bahwa kerusakan gedung sekolah sangat besar. Untuk SD daerah terluar, terjadi kerusakan 4,40% gedung sekolah rusak berat dan 2,86% rusak Total. Untuk tingkat SMP 5,27% gedungnya rusak berat dan 2,86% rusak ringan. Kerusakan yang paling banyak terjadi, baik SD maupun SMP berada di daerah terdepan dan tertinggal. Kerusakan gedung tersebut berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka menuntaskan Wajar 9 Tahun, kerusakan tersebut perlu diatasi, sehingga dapat memberikan kenyamanan pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akses pendidikan di daerah 3T ditunjukkan dengan APK dan APM. Secara rata-rata APK dan APM untuk SD di daerah 3T mengalami penurunan dibanding tahun 2016 lalu. Penurunan ini sama dengan penurunan secara nasional yang berarti bukan menurunkan kinerja pendidikan di daerah tersebut. Penurunan yang terjadi pada tingkat SD ini disebabkan banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya pada usia 7-12 tahun, sebagaimana Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 yang mempersyaratkan usia masuk anak SD adalah 7 tahun. Pada tingkat pendidikan SMP terjadi kenaikan APK yang disebabkan oleh kenaikan jumlah peserta didik dari SD ke SMP sederajat. Namun demikian, untuk tingkat SMP ini, APK dan APM masih terdapat disparitas yang tinggi terutama pada daerah miskin dan tertinggal. Rendahnya capaian APK dan APM SMP lebih banyak ditemui pada daerah Tertinggal dibanding daerah Terluar dan Terdepan. Yang perlu menjadi perhatian dan prioritas pemerintah adalah wilayah Indonesia bagian timur.
2. Ketersediaan prasarana berupa ruang kelas di daerah 3T, diukur dengan rasio siswa per ruang kelas, rasio rombel per ruang kelas, ketersediaan perpustakaan, dan laboratorium. Rata-rata rasio

siswa per kelas untuk SD di daerah Terdepan adalah 19,4 dan SMP 25,6. Ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten di daerah Terdepan yang melebihi dari ketentuan standar prasarana. Kekurangan prasarana ruang kelas lebih banyak terjadi pada daerah Tertinggal terutama pada daerah bagian timur Indonesia yang ditandai dengan kepadatan siswa di daerah Tertinggal di wilayah Timur Indonesia khususnya daerah Kab. Yalimo, Kab. Manggarai, Kab. Yalimo, Kab. Lanny Jaya, Kab. Jaya Wijaya, Kab. Mamberamo Jaya dan Kab. Tolikara.

3. Pada ketersediaan Perpustakaan di tingkat SD, hampir seluruh daerah 3T belum sepenuhnya sekolah memiliki perpustakaan. Untuk daerah Terluar tingkat SD 68,4%% serta dalam kondisi rusak sebanyak 6,68% sisanya rusak ringan, sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 76,49% dengan kondisi rusak 10,63%. Untuk daerah terdepan ketersediaan perpustakaan tingkat SD 58,4%% serta dalam kondisi rusak sebanyak 15,19% sisanya rusak ringan, sedangkan untuk tingkat SMP sebanyak 77,4% dengan kondisi rusak 15,19%. Pada tingkat pendidikan SMP belum seluruh sekolah di daerah 3T memiliki perpustakaan. Untuk daerah tertinggal cukup memperhatikan ketersediaan perpustakannya, untuk tingkat SD hanya 52,92% serta dalam kondisi rusak sebanyak 10,69%, sedangkan tingkat SMP yang memiliki perpustakaan hanya 58,72% dalam kondisi rusak 16,69%.
4. Besarnya anggaran pendidikan (tanpa transfer daerah) yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah secara rata-rata berpengaruh terhadap peningkatan akses pendidikan. Pada

kategori daerah tertinggal beberapa daerah berupaya terlepas dari kategori Tertinggal dengan berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan, misalnya Kab. Situbondo, Ende, Musi Rawas, Sorong, Lebak, Pasaman Barat yang rata-rata alokasi anggaran pendidikan diatas 10% memberikan dampak pada peningkatan APK.

B. Rekomendasi

1. Optimalisasi pemeliharaan dan pembuatan SOP (standar operasional prosedur) pemakaian prasarana di setiap sekolah.

Optimalisasi pemeliharaan perlu dilakukan, karena sebagian sarana pembelajaran tidak hanya rusak saat pemakaian tapi juga rusak pada saat penyimpanan. Sehingga diperlukan acuan baku dalam pemanfaatan dan penyimpanan sehingga sarana-prasarana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih lama.

2. Politik anggaran, yaitu menjadikan pemenuhan prasarana sebagai prioritas dalam APBD.

Langkah yang dapat ditempuh misalnya pengalihan prioritas anggaran di bidang pendidikan untuk pemenuhan sarana-prasarana minimal sesuai dengan Permendiknas No. 24 tahun 2007 atau pengalihan dan pengurangan mata anggaran dengan daya serap rendah untuk dialihkan ke anggaran bidang pendidikan.

3. Optimalisasi sumber pembiayaan pendidikan untuk melengkapi kekurangan prasarana, misalnya; penertiban dana CSR (*corporate social responsibility*) dan CD (*community development*) untuk pemenuhan standar prasarana.

Langkah yang dapat diambil misalnya dengan meningkatkan peran swasta dalam upaya pemenuhan prasarana pendidikan. Seperti diketahui di Kawasan Timur terdapat sektor-sektor usaha swasta yang berskala nasional bahkan internasional. Sektor-sektor usaha ini merupakan alternatif sumber pembiayaan prasarana. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR maupun CD baik dalam mekanisme *community relation* yaitu berupa pemberian dana langsung, *community service* yaitu pembangunan/ penyediaan fasilitas pendidikan oleh perusahaan swasta seperti penyediaan perpustakaan keliling, maupun *community empowerment* yaitu pemberdayaan guru, misalnya memperbanyak pelatihan yang dibiayai pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah.

Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

Buku dan Artikel

Barnawi dan Arifin. 2016. Manajemen Sarana & Prasarana Sekola, Jogjakarta: ARRUZZMEDIA.

Endang Herawan dan Sukarti Nasihin. 2001. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Pengantar Pengelolaan Pendidikan, Bandung: Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI.

Engkoswara, dan Aan Komariah. 2010. Administrasi Pendidikan, Bandung. Alfabeta

Hakim, Likman. 2016. *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun*

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jurna Edutech Vol 2 No.1 Tahun 2016. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Harahap, Fauziah. 2017 . *Makalah Mutu Pendidikan*. Universitas Negeri Malang.

Hasbullah. 2005. *Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta. PT Raja Grasindo Persada.

Ibrahim Bafadal. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Imron Arifin. 1989. *Adult Learning*, third edition.. Milton Keynes Philadelphia

Mulyasa. 2014. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Redja Mudyardjo. 2002. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sirodjuddin, Ardan. 2014. *Mengapa Pendidikan Indonesia Saat Ini Tidak Mampu Menciptakan Generasi Hebat ?*. Yogyakarta. Penerbit Guraru.

Soebagio Admodiwiro. 2000. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Ardadizya.

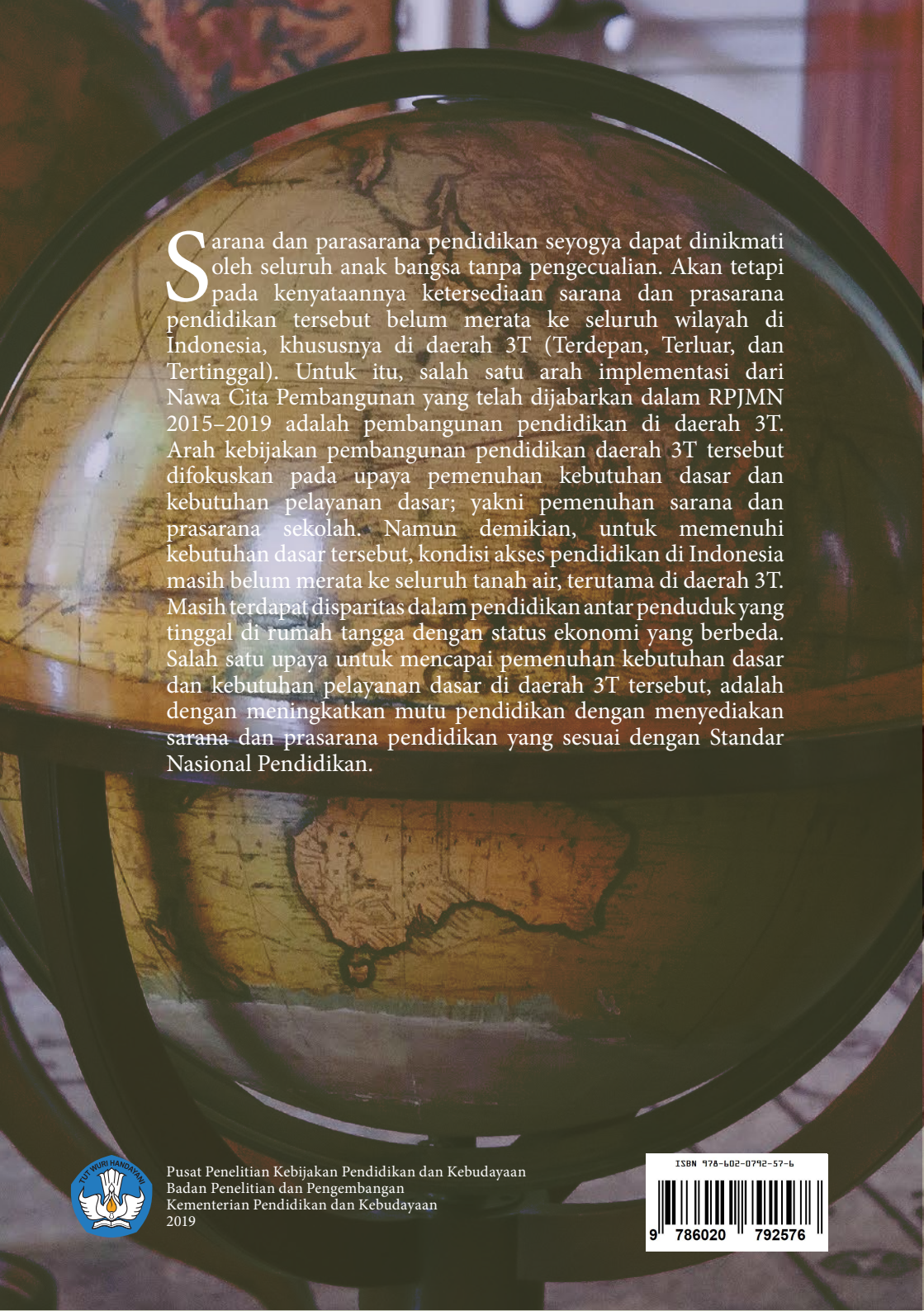
Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana. 2009, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta. Aditya Media.

Internet

<http://scdc.binus.ac.id/himpgsd/2017/03/saranadanprasaranapendidikan/> diakses 20 Desember 2018.

<https://tatangmanguny.wordpress.com/2010/04/07/pengertian-sarana-dan-prasarana-pendidikan/> diakses 20 Desember 2018.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/meski-akses-mudah-kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-rendah-1> diakses 20 Desember 2018.



Sarana dan prasarana pendidikan seyogya dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa tanpa pengecualian. Akan tetapi pada kenyataannya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut belum merata ke seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Untuk itu, salah satu arah implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015–2019 adalah pembangunan pendidikan di daerah 3T. Arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah 3T tersebut difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar; yakni pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kondisi akses pendidikan di Indonesia masih belum merata ke seluruh tanah air, terutama di daerah 3T. Masih terdapat disparitas dalam pendidikan antar penduduk yang tinggal di rumah tangga dengan status ekonomi yang berbeda. Salah satu upaya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar di daerah 3T tersebut, adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.



Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019

ISBN 978-602-0792-57-6

